



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

**INSPEKTORAT**

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8 Telp. 061-4150461 – 4524309 – Fax. 061-4150194

M E D A N - 20154

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akrual, andal dan absah.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Medan,

29 Maret 2022



**LASRO MARBUN**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19641201 198701 1 002



# **LAPORAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara  
Jalan. P. Diponegoro No. 30 Medan 20152  
[www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)





## KATA PENGANTAR

Puji syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dapat diselesaikan. Laporan kinerja instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 merupakan tahun ketiga periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun berdasarkan sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan secara terus menerus seperti penyempurnaan sasaran strategis dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan komitmen seluruh aparatur sipil negara dan penguatan manajemen kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan koreksi internal penyelenggaraan pemerintahan guna keberlanjutan pembangunan daerah di masa yang akan datang dan juga dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi eksternal publik.

Medan, 31 Maret 2022

**GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**EDY RAHMAYADI**

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran yang dapat diukur. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat Provinsi telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 yang menjabarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara terpilih dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan, program dan kegiatan pembangunan.

Keberhasilan dan kegagalan selama tahun 2021 perlu evaluasi guna mengetahui dan menilai capaian-capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi ini berguna untuk menyusun perencanaan pada tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 yaitu Sumatera Utara yang maju, aman, dan bermartabat.

## DAFTAR ISI

<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>	1
LATAR BELAKANG	1
MAKSUD DAN TUJUAN	2
GAMBARAN UMUM	
PROVINSI SUMATERA UTARA	2
ISU STRATEGIS ( <i>Strategic Issued</i> )	
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA	5
<b>BAB II – PERENCANAAN KINERJA</b>	8
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	
Tahun 2019-2023	8
Visi dan Misi	8
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	10
Indikator Kinerja Utama	11
Perubahan Indikator Kinerja Utama	14
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi	
Sumatera Utara 2021	15
<b>BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA</b>	17
<b>3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	18
<b>3.2. PENGUKURAN, EVALUSAI DAN ANALISIS KINERJA</b>	
<b>SASARAN STRATEGIS</b>	19
<b>3.3. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021</b>	21
<b>Misi 1</b>	23
Sasaran Strategis 1	23
Sasaran Strategis 2	26
Sasaran Strategis 3	27
Sasaran Strategis 4	33
Sasaran Strategis 5	36
Sasaran Strategis 6	37
Sasaran Strategis 7	45
Sasaran Strategis 8	46
<b>Misi 2</b>	47
Sasaran Strategis 1	47
<b>Misi 3</b>	49
Sasaran Strategis 1	49
<b>Misi 4</b>	50
Sasaran Strategis 1	50
Sasaran Strategis 2	51
Sasaran Strategis 3	52
<b>Misi 5</b>	53
Sasaran Strategis 1	54
<b>3.4. REALISASI ANGGARAN</b>	71
<b>BAB IV – PENUTUP</b>	77
KESIMPULAN	77
Langkah Yang Akan Dilaksanakan Di Masa Mendatang	77



## TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK

Tabel 1.1. Luar Wilayah/Kota Provsu .....	3
Tabel 2.1. Tujuan & Sasaran Pemprovsu 2019-2023 .....	10
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2019-2023 .....	12
Tabel 2.3. Perubahan Indikator Kinerja Utama .....	14
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provsu Tahun 2021 .....	15
Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Provsu .....	17
Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	18
Tabel 3.3. Sasaran Strategis & IKU Provsu Tahun 2019-2023 .....	20
Tabel 3.4. Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2021 .....	21
Tabel 3.5. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provsu Tahun 2020-2021 .....	27
Tabel 3.6. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Sumatera Utara, September 2020-September 2021 .....	32
Tabel 3.7. Bantuan Sambungan Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2021 ....	41
Tabel 3.8. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya .....	44
Tabel 3.9. Pembangunan Penerangan Umum Tenaga Surya .....	44
Tabel 3.10. Rasio Elektrifikasi Provsu .....	45
Tabel 3.11. Tingkat Inflasi Desember 2021, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 5 Kota IHK di Sumatera Utara (2018=100) .....	46
Tabel 3.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen, 2011-2021 .....	47
Tabel 3.13. Rata-rata Lama Sekolah .....	49
Tabel 3.14. Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2020 .....	53
Tabel 3.15. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup .....	54
Tabel 3.16. Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) .....	57
Tabel 3.17. Skor Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Tahun 2020 .....	58
Tabel 3.18. Jumlah Kunjungan Wisman Periode Januari s.d. Desember Tahun 2021 .....	59
Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi .....	3
Gambar 3.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama .....	24
Grafik 3.1. Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara (2010-2021) .....	29
Grafik 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 .....	31
Grafik 3.3. Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara, September 2014-September 2021 .....	33
Grafik 3.4. Rumah Layak Huni .....	34
Grafik 3.5. Akses Rumah Layak Huni .....	36

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting dan harus dilaksanakan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang berkualitas dan menjamin kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien serta tepat sasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) didasarkan pada Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menjadi bagian penting dari reformasi birokrasi yang saat ini sedang dijalankan pemerintah, dan merupakan bentuk penerapan dari praktik pemerintahan yang baik (*good governance*). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) akan mewujudkan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah (*governance*), pembangunan (*development*), dan pelayanan publik (*public services*). Penyusunan LKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023, Rencana Kerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2021.

## **1.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Presiden, DPRD, masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja.

Laporan kinerja instansi pemerintah diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Sumatera Utara;
2. Menjadikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah provinsi Sumatera Utara guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Sumatera Utara terhadap penyelenggaraan pemerintah provinsi Sumatera Utara.

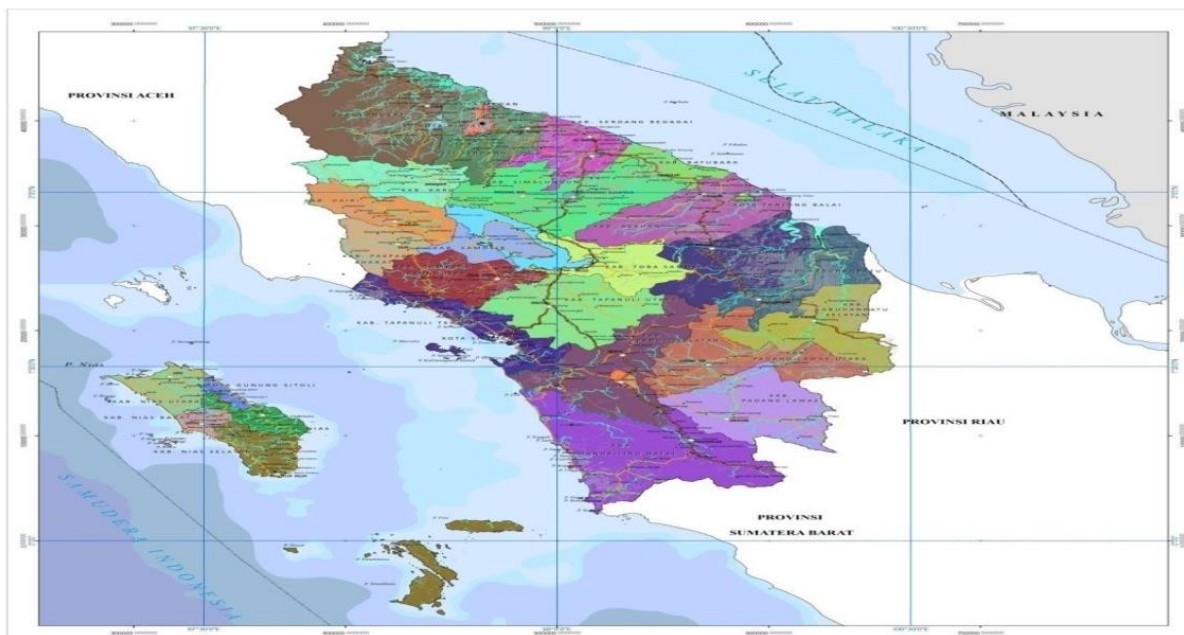
## **1.3. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA**

### **a. Kondisi Geografis**

Luas wilayah Sumatera Utara mencapai 18.298.123 ha (182.981,23 km<sup>2</sup>) yang terdiri dari luas daratan 7.298.123 ha dan luas lautan 11.000.000 ha. Luas lautan mencapai 60,5 persen, dengan garis pantai sepanjang 1.300 km. Luas daratan Sumatera Utara sekitar 3,82 persen dari luas Indonesia dengan jumlah pulau sebanyak 232 (BPS, 2020).



Gambar 1.1.  
Peta Wilayah Administrasi



Sumber : Perda No.2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 kabupaten dan 8 kota, 450 kecamatan, 5.417 desa dan 693 kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1.  
Luar Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba	Balige	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.369,00
10. Dairi	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. Karo	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05

18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	12	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.596,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.570,98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.202,78
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	473,73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	41,31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	107,83
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	55,66
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	31,00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	59,19
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	114,66
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	280,78
SUMATERA UTARA	Medan	450	5417	693	72.981,23

*Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka 2020*

## **b. Letak dan Kondisi Geografis**

### **i. Posisi Astronomis**

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau daerah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Sumatera Utara adalah  $0^{\circ} 50'$  lintang selatan  $-4^{\circ} 40' - 100^{\circ} 50'$  bujur timur. Sumatera Utara berada di sebelah barat Indonesia dan memiliki selisih perbedaan waktu satu jam dengan Indonesia bagian tengah dan perbedaan waktu dua jam dengan Indonesia bagian timur.

### **ii. Posisi Geostrategis**

Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut serta dua provinsi lain. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara :

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

Sumatera Utara memiliki posisi yang strategis karena berada di jalur pelayaran nasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dengan posisi strategis itu, Provinsi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi hub internasional, yang selanjutnya akan ikut menggerakkan perekonomian di wilayah-wilayah lain di Pulau Sumatera.

### **iii. Kondisi/Kawasan**

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari beberapa kondisi kawasan yaitu pesisir, pegunungan, dan kepulauan. Kondisi pesisir wilayah Sumatera

Utara meliputi 68 kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut, yaitu 23 kecamatan di wilayah Pantai Barat dan 31 kecamatan di wilayah Pantai Timur, 14 kecamatan di wilayah Kepulauan Nias.

Kondisi wilayah Sumatera Utara yang merupakan wilayah pegunungan atau berada di atas ketinggian 600 mdpl seluas 2.478.735 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

Kondisi kepulauan meliputi 232 pulau. Tiga pulau diantaranya merupakan pulau-pulau kecil terluar yaitu Pulau Berhala di Pantai Timur, dan Pulau Simuk dan Pulau Wunga di Pantai Barat.

### **c. Topografi**

#### **a. Kemiringan Lahan**

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari wilayah pegunungan, perbukitan dan dataran rendah. Wilayah pegunungan dan perbukitan dengan kemiringan lereng lebih dari 30 persen berada di tengah, membujur searah dengan Danau Toba (dari arah barat laut-tenggara), sebagai bagian dari deretan pegunungan Bukit Barisan. Sedangkan wilayah dataran rendah menempati daerah di bagian Timur dan pesisir barat. Kemiringan tanah antara 0-12 persen seluas 47.810 km<sup>2</sup> dan diatas 40 persen seluas 17.719 Km<sup>2</sup>.

#### **b. Ketinggian Lahan**

Ketinggian lahan di Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0-2.807 mdpl. Dataran rendah dengan ketinggian 0-300 mdpl seluas 3.819.375 ha atau 52,33 persen dari luas daratan Sumatera Utara, perbukitan dengan ketinggian 300-600 mdpl seluas 1.000.293 ha atau 13,70 persen dari luas daratan Sumatera Utara, dan pegunungan dengan ketinggian diatas 600 mdpl seluas 2.478.455 ha atau sebesar 33,96 persen dari luas daratan Sumatera Utara.

## **1.4. ISU STRATEGIS (*Strategic Issued*) PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021**

Isu strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2021 adalah :

- a) Pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat melalui penyiapan fasilitas dan layanan kesehatan, pengaman sosial dan stimulus ekonomi;



- b) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan dengan cara pemberdayaan dan penguatan usaha mikro kecil, peningkatan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, peningkatan peluang usaha penduduk miskin, peningkatan kualitas masyarakat miskin, pengembangan perekonomian pedesaan, serta peningkatan akses kesempatan kerja penduduk miskin;
- c) Meminimalisir tingkat pengangguran dengan cara peningkatan sumber daya manusia dengan skill tertentu sehingga sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d) Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan dari SMA/SMK ke Perguruan Tinggi akibat kondisi ekonomi keluarga kurang mampu sehingga perlu kerjasama pemerintah untuk ikut membantu penyelenggaraan pendidikan (beasiswa). Persoalan ekonomi merupakan salah satu persoalan sangat penting dalam proses pendidikan formal. Oleh karena itu, bila ekonomi seseorang mengalami kesuraman pastinya proses pendidikan akan terhambat. Sementara biaya pendidikan saat ini, semakin hari semakin meningkat seiring dengan meningkatnya berbagai kebutuhan dalam rumah tangga, ditambah lagi semakin meningkatnya kebutuhan pokok sehari-hari;
- e) Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif harus didukung dengan implementasi pembangunan kesehatan dan gizi yang baik. Sedari dini, bahkan sejak bayi berada dalam kandungan, asupan nutrisi harus diperhatikan. Sehingga, potensi terkena gizi buruk, stunting, dan lainnya bisa teratasi. Kondisi ini akan mempengaruhi tingkat kematian ibu dan bayi serta Usia Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini masih berada dibawah angka nasional;
- f) Penurunan ketimpangan antar wilayah menjadi salah satu isu strategis yang akan menjadi prioritas, upaya-upaya penguatan pusat pertumbuhan wilayah sangat dibutuhkan mengingat keberhasilan pusat pertumbuhan baru yang rendah;
- g) Pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah perlu ditingkatkan. Konektifitas inter dan intra wilayah melalui peningkatan pembangunan jalan dan jembatan dan pengembangan moda transportasi massal, penyediaan kebutuhan dasar rumah layak huni, penyediaan energi listrik, air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Selain itu, untuk

menunjang produksi hasil pertanian dan ketahanan pangan, maka infrastruktur irigasi masih perlu ditingkatkan;

- h) Pasca ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Wilayah Provinsi Sumatera Utara maka tahapan selanjutnya adalah pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Untuk ini dibutuhkan regulasi turunan berupa rencana rinci tata ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i) Isu pelayanan publik terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan mencuat seiring rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan adanya korupsi birokrasi. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diarahkan agar dapat memberikan kontribusi yang bermakna atas strategi-upaya pelayanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Komitmen dan kepatuhan terhadap keberlangsungan capaian pelayanan publik dapat mempengaruhi kepercayaan publik.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019 – 2023**

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 (lima) tahun ke depan mampu menjawab tuntutan strategis lokal, nasional dan global namun dalam tatanan sistem administrasi negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyeleraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

##### **2.1.1. Visi dan Misi**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005 – 2025. Visi pembangunan jangka menengah provinsi Sumatera Utara merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Adapun visi provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 adalah :

***"Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat"***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

**Sumatera Utara**, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hal dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;



**Maju**, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera Utara;

**Aman**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktifitas keseharian;

**Bermartabat**, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 sebagai berikut:

- Misi Pertama :  
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;
- Misi Kedua :  
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;
- Misi Ketiga :  
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
- Misi Keempat :  
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia;
- Misi Kelima :  
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

### 2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategik. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator kinerja yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan.

Tabel 2.1.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah:

Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang religius	1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan umat beragama
		1.2	Meningkatnya ketersediaan sandang pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
		1.3	Meningkatnya rumah yang layak	Rasio Rumah Layak Huni
		1.4	Meningkatnya kesehatan yang prima	<ul style="list-style-type: none"> <li>Usia Harapan Hidup</li> <li><i>Total Fertility Rate</i> (TFR)</li> </ul>
		1.5	Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nilai Tukar Petani</li> <li>Persentase Kemiskinan</li> <li>Tingkat Pengangguran Terbuka</li> <li>Indeks Gini</li> <li>Pertumbuhan Ekonomi</li> <li>Inflasi</li> </ul>
		1.6	Meningkatnya keterjangkauan harga	
		1.7	Meningkatnya konektivitas infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi</li> <li>Rasio elektrifikasi</li> </ul>

Misi	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik	2.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah</li> <li>• Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)</li> </ul>
		2.2	Meningkatnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Masyarakat yang menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan</li> </ul>
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat	3.1	Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif berdaya saing dan mandiri	Angka Rata-rata Lama Sekolah
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan	4.1	Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	Persentase terpeliharanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan teratur
		4.2	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</li> <li>• Indeks Resiko Bencana</li> </ul>
		5.2	Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara</li> <li>• Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB</li> </ul>

## 2.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan



Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Tabel 2.2  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 – 2023

Misi	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	77	80	83	85	90
	2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	92,3	94,3	96,3	98,1
	3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	100,10	100,10	100,10	100,10	100,20
	4	Tingkat Pengangguran terbuka	Persen	5,5	5,45	5,4	5,32	5,3
	5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7
	6	Persentase kemiskinan	Persen	8,87	8,43	8,04	7,7	7,39
	7	Indeks gini	Poin	0,325	0,32	0,315	0,31	0,3
	8	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72	93,22	93,72	94,22	94,72
	9	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,87	69	69,13	70,00
	10	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,84	2,82	2,8	2,78
	11	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82,99	84,52	86,29	88,59	90
	12	Resiko Elektrifikasi	Persen	99,9	100	100	100	100
	13	Inflasi	Persen	2,95	2,9	2,85	2,8	2,75
	14	IPM	Poin	71,12	71,67	72,22	72,77	73,32

Misi	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target				
				2019	2020	2021	2022	2023
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	15	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	16	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	BB	BB	BB
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	17	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,79	9,97	10,15	10,33	10,50
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia	18	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Poin	0,90	0,93	0,96	0,99	1
	19	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	45	60	75	80	85
	20	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,87	90,93	91	91,08	91,09
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab	21	Indeks kualitas lingkungan Hidup	Poin	68,00	69,00	70,00	71,00	72,00
	22	Indeks resiko bencana	Poin	145	134,4	127	121	109
	23	Jumlah kunjungan wisatawan Mancanegara	Orang	280.000	300.000	370.000	400.000	500.000

### 2.3. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021, maka Indikator Kinerja Utama Gubernur Sumatera Utara juga mengalami perubahan. Selain itu, target IKU pemerintah daerah mulai tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami penyesuaian dengan mempertimbangkan dampak dari pandemi Covid-19.

Tabel 2.3.  
Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Misi	Indikator Kinerja Utama	Target		
			2021	2022	2023
1.	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Indeks Pendidikan	68,65-69,15	68,75-69,25	68,85-69,35
		Indeks Kesehatan	75,65-76,15	75,70-76,20	75,75-76,25
2.	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Indeks Demokrasi	65,25	65,50	65,75
		Indeks Reformasi Birokrasi	BB (64,00)	BB (70,00)	BB (75,00)
3.	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	PDRB per kapita (ADHB)	57,00	59,00	61,00
		Indeks Infrastruktur	0,70	0,74	0,79

No.	Misi	Indikator Kinerja Utama	Target		
			2021	2022	2023
4.	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	91	92	93
5.	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,02	69,20	69,38

#### 2.4. Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh Pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019 – 2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4.  
Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	83
2.	Meningkatnya ketersediaan sandang pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,3



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
3.	Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10
		Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,4
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5
		Persentase kemiskinan	Persen	8,04
		Indeks Gini	Poin	0,315
4.	Meningkatnya rumah yang layak	Rasio rumah layak huni	Persen	93,72
5.	Meningkatnya kesehatan yang prima	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69
		Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,82
6.	Meningkatnya infrastruktur dasar	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	86,29
		Rasio Elektrifikasi	Persen	100
7.	Meningkatnya keterjangkauan harga	Inflasi	Persen	2,85
8.	Terwujudnya masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam kehidupan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	72,22
9.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP
		Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB
10.	Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,15
11.	Terwujudnya masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam pergaulan	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,96
12.	Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	75
13.	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks pembangunan gender	Poin	91,08
14.	Meningkatkannya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Poin	70
		Indeks resiko bencana	Poin	127
15.	Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	370.000

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2021.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	$\geq 80$	Sangat Baik
2	60 – 79,9	Baik
3	50 – 59,9	Sedang
4	0 – 49,9	Kurang

### 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<b>I</b>	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	83	77,4	93,25%
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,3	85	90,14%
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10	119,06	118,94%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,4	6,33	115%
5	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,5	2,61	47,45%
6	Persentase kemiskinan	Persen	8,04	8,49	105,6%
7	Indeks Gini	Poin	0,315	0,313	99,37%
8	Rasio rumah layak huni	Persen	93,72	69,5	74,16%
9	Usia harapan hidup	Tahun	69	69,23	100,33%
10	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Nilai	2,82	2,60	190%
11	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	86,29	76,37	8,50%
12	Rasio Elektrifikasi	Persen	100	99,82	99,82%
13	Inflasi	Persen	2,85	1,71	225%
14	Indeks pembangunan manusia	Poin	72,22	72	99,70%
<b>II</b>	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP		
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB		

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
<b>III</b>	Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,15	9,58	94,38%
<b>IV</b>	Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia				
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,96	1,67	173,96%
2	Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	75	80	105,00%
3	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91	90,67	99,64%
<b>V</b>	Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70	71,15	100,64%
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	127	145,18	Tinggi
3	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	370.000	240	0,06%

### 3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing – masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2019 – 2023, RKPD tahun 2021 dan Perubahan RKPD tahun 2021.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan 15 (lima belas) sasaran strategis dengan 23 (dua puluh tiga) indikator kinerja (*outcome*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 - 2023

SASARAN	URAIAN	JUMLAH	INDIKATOR KINERJA
Sasaran 1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Sasaran 2	Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Sasaran 3	Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan	5	Nilai Tukar Petani (NTP)
			Tingkat pengangguran terbuka
			Pertumbuhan ekonomi
			Persentase kemiskinan
			Indeks gini
Sasaran 4	Meningkatnya rumah layak huni	1	Rasio rumah layak huni
Sasaran 5	Meningkatnya kesehatan yang prima	2	Usia Harapan Hidup (UHH)
			<i>Total fertility rate</i> (TFR)
Sasaran 6	Meningkatnya infrastruktur dasar	2	Tingkat kemantapan jalan Provinsi
			Rasio elektrifikasi
Sasaran 7	Meningkatnya keterjangkauan harga	1	Inflasi
Sasaran 8	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan	1	Indeks pembangunan manusia
Sasaran 9	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	2	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah
			Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)
Sasaran 10	Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	1	Angka rata-rata lama sekolah
Sasaran 11	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan	1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat
Sasaran 12	Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	1	Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan
Sasaran 13	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1	Indeks pembangunan gender
Sasaran 13	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	2	Indeks kualitas lingkungan hidup
			Indeks resiko bencana
Sasaran 15	Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan	1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara



### 3.3 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

#### 3.3.1 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.  
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
<b>Misi 1</b> : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatnya kerukunan umat beragama						
1	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	83	77,4	93,25%	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis 2</b> : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,3	85	90,14%	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis 3</b> : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	100,10	119,06	118,94%	Sangat Baik
2	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,4	6,33	85,31	Tinggi
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5	2,61	47,45%	Rendah
4	Persentase kemiskinan	Persen	8,04	8,49	105,6%	Tinggi
5	Indeks gini	Poin	0,315	0,313	99,37%	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis 4</b> : Meningkatnya rumah layak huni						
1	Rasio rumah layak huni	Persen	93,72	69,5	74,16%	Baik
<b>Sasaran Strategis 5</b> : Meningkatnya kesehatan yang prima						
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69	69,23	100,33%	Sangat Baik
2	<i>Total fertility rate</i> (TFR)	Nilai	2,82	2,60	190%	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis 6</b> : Meningkatnya infrastruktur dasar						
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	86,29	76,37	88,50%	Sangat Baik
2	Rasio elektrifikasi	Persen	100	99,82	99,82%	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis 7</b> : Meningkatnya keterjangkauan harga						
1	Inflasi	Persen	2,85	1,71	225 %	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis 8</b> : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat						
1	Indeks pembangunan manusia	Poin	72,22	72	99,70%	Sangat Baik
<b>Misi 2</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis						

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas						
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP			
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	BB			
<b>Misi 3</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri						
<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri						
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,15	9,58	94,38%	Sangat Baik
<b>Misi 4</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia						
<b>Sasaran Strategis 1</b> : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan						
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,96	1,67	173,96%	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis 2</b> : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan						
1	Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persentase	75	80	105%	Sangat Baik
<b>Sasaran Strategis 3</b> : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan						
1	Indeks pembangunan gender	Poin	91,08	90,67	99,64%	Sangat Baik
<b>Misi 5</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab						
<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70	71,15	100,64%	Sangat Baik
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	127	145,18	-	Tinggi
<b>Sasaran Strategis 2</b> : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan						
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	370.000	240	0,06%	Kurang

### 3.3.2 Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2021

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023.

**Misi 1 :** Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Misi I ini terdiri dari 8 (delapan) Sasaran Strategis dan diukur melalui 14 (empat belas) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : meningkatnya kerukunan umat beragama. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*sangat baik*". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Indeks Kerukunan Umat Beragama**

Berbagai bentuk penilaian capaian tentang kerukunan telah dibuat, namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran karena dilakukan berdasarkan tujuan, teknis, dan standar yang berbeda-beda. Kementerian Agama selaku instansi pemerintah yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan di bidang agama menetapkan suatu ukuran standar penyusunan indeks kerukunan umat beragama yang disusun secara komprehensif dengan standar nasional. Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, menghormati/menghargai perbedaan. Kesetaraan, mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas. Selanjutnya, kerjasama menggambarkan keterlibatan aktif bergabung dengan pihak lain dan memberikan empati dan simpati kepada kelompok lain dalam dimensi sosial, ekonomi, budaya dan keagamaan. Kementerian Agama meluncurkan Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) di Indonesia tahun 2021. Kementerian Agama menilai indeks KUB adalah ruang diseminasi riset kebijakan berupa pemetaan kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia. Sekaligus dinamika keagamaan aktual mencari formula solusi untuk kebijakan keagamaan yang lebih baik. Survei untuk kerukunan umat beragama dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Gambar 3.1.  
Indeks Kerukunan Umat Beragama



Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia

Komponen Indikator Kerukunan Umat Beragama tersebut adalah toleransi 68,72, kerja sama 73,41, dan kesetaraan 75,03. Kerukunan Umat Beragama itu disebar kepada 136.000 responden dari 34 provinsi. Indeks Kerukunan Umat Beragama 2021 di Provinsi Sumatera Utara tergolong tinggi dengan skor 77,4 dan melampaui target nasional sebesar 72,39.

Skor indeks kerukunan umat beragama nasional dari tahun ke tahun juga berubah. Pada tahun 2017 sebesar 72,27, 2018 menjadi 70,9, 2019 sebesar 73,83, 2020 sebesar 67,46, dan 2021 meningkat 72,39.

Berikut peta indeks kerukunan umat beragama 2021 di Indonesia:

No.	Provinsi	Skor	Keterangan
1.	Aceh	63,6	
2.	Sumatera Utara	77,4	
3.	Kepulauan Riau	75,4	
4.	Riau	69,2	
5.	Sumatera Barat	70,5	
6.	Jambi	73	
7.	Bangka Belitung	72,5	
8.	Sumatera Selatan	71,5	
9.	Bengkulu	73,3	
10.	Lampung	76	
11.	DKI Jakarta	72,2	
12.	Banten	69,6	
13.	Jawa Barat	72,7	
14.	Jawa Tengah	77	
15.	DI. Yogyakarta	77,1	
16.	Jawa Timur	77,8	
17.	Bali	82,7	
18.	Kalimantan Barat	81,3	
19.	Kalimantan Tengah	78,4	
20.	Kalimantan Utara	76,9	
21.	Kalimantan Timur	76,6	
22.	Kalimantan Selatan	69,1	
23.	Sulawesi Barat	76,2	
24.	Sulawesi Selatan	74,6	
25.	Sulawesi Tengah	76,6	
26.	Sulawesi Tenggara	72,7	
27.	Sulawesi Utara	81,9	
28.	Gorontalo	71,9	
29.	Nusa Tenggara Barat	69,2	



No.	Provinsi	Skor	Keterangan
30.	Nusa Tenggara Timur	84,2	
31.	Maluku Utara	76,4	
32.	Maluku	80,3	
33.	Papua Barat	81,4	
34.	Papua	82,1	

*Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia*

Sasaran Strategis 2 : meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*sangat baik*". Indikator dimaksud adalah:

➤ **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**

Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 mencapai 85,00 poin. Capaian ini meningkat 1,47% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang sebesar 83,77 poin. Akan tetapi pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tersebut masih dibawah target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi tahun 2021 yaitu sebesar 92,3 poin. Hal ini menggambarkan bahwa konsumsi masyarakat terhadap semua bahan pangan di tahun 2021 masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang atau masih belum beragam (cenderung mengonsumsi bahan makanan yang sama tiap harinya). Tidak tercapainya target Skor Pola Pangan harapan (PPH) Konsumsi disebabkan antara lain masa pandemi Covid-19 dimana banyak keluarga berkurang kemampuannya dalam pembelian bahan makanan. Walaupun Skor PPH mengalami belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun konsumsi energi masyarakat yang merupakan sumber tenaga masyarakat Sumatera Utara dalam beraktivitas sebesar 2.003,4 kkal/kap/hari sudah memenuhi 93,18% dari Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2150 kalori dan sudah dikategorikan normal. Konsumsi beras masih berada di atas konsumsi ideal yaitu 317,9 gram per kapita per hari atau 116,0 kg/kap/tahun dan konsumsi ini sudah menurun dibanding konsumsi tahun 2020 sebesar 116,2 kg/kap/tahun. Penurunan konsumsi beras ini sudah menggambarkan peningkatan keberagaman konsumsi sumber energi.

Menghadapi pandemic Covid-19 Pemerintah telah berupaya untuk menangani hal ini dengan memperluas cakupan program perlindungan sosial sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara kedepannya akan meningkatkan promosi dan kampanye pangan berbasis B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sehingga dapat menjangkau

semua lapisan masyarakat dan agar masyarakat Sumatera Utara bisa mengkonsumsi beraneka ragam bahan makanan yang ketersediaannya di pasaran sudah mencukupi kebutuhan.

Sasaran Strategis 3 : meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan. Hasil pengukuran melalui 5 (lima) indikator kinerja dengan capaian "*sangat baik*". Indikator dimaksud adalah :

### 1) Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani (dalam persentase), merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya.

Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2021, NTP Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen dibanding November 2021 yaitu dari 125,75 menjadi 125,95. Terjadinya kenaikan NTP Desember 2021 disebabkan oleh naiknya NTP pada empat subsektor, yaitu NTP subsektor tanaman pangan sebesar 0,20 persen, NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,41 persen, dan NTP subsektor Peternakan sebesar 0,13 persen, dan NTP subsektor perikanan sebesar 0,87 persen. Sedangkan NTP subsektor hortikultura turun sebesar 2,38 persen.

Tabel 3.5.  
Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2021  
(2018=100)

Tahun/Bulan	It		Ib		NTP	
	Indeks	% Perubahan	Indeks	% Perubahan	Rasio	% Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2020						
Januari	118,00	2,26	103,79	0,50	113,69	1,75
Februari	116,47	-1,30	104,26	0,45	111,71	-1,74
Maret	114,03	-2,09	104,22	-0,03	109,41	-2,06
April	110,94	-2,71	104,26	0,04	106,41	-2,74
Mei	109,11	-1,65	104,41	0,14	104,50	-1,79
Juni	109,65	0,49	104,29	-0,11	105,13	0,60

Juli	111,38	1,58	104,25	-0,04	106,84	1,63
Agustus	113,10	1,55	104,21	-0,03	108,53	1,58
September	115,25	1,90	104,35	0,13	110,44	1,76
Oktober	117,37	1,84	104,78	0,42	112,01	1,42
November	119,80	2,07	105,09	0,29	114,00	1,77
Desember	121,89	1,75	105,80	0,68	115,21	1,06
Rata-rata 2020	114,75		104,48		109,83	
2021						
Januari	122,67	0,64	106,71	0,86	114,96	-0,22
Februari	122,50	-0,15	106,81	0,09	114,69	-0,23
Maret	124,77	1,85	106,59	-0,20	117,05	2,06
April	125,24	0,38	106,56	-0,03	117,53	0,41
Mei	126,39	0,91	106,58	0,02	118,58	0,89
Juni	124,09	-1,82	106,45	-0,12	116,56	-1,70
Juli	123,74	-0,28	106,88	0,40	115,78	-0,68
Agustus	126,05	1,86	106,90	0,01	117,92	1,85
September	129,06	2,39	107,01	0,10	120,61	2,28
Oktober	131,69	2,04	106,88	-0,12	123,21	2,16
November	135,09	2,59	107,43	0,52	125,75	2,06
Desember	135,76	0,49	107,78	0,33	125,95	0,16
Rata-rata 2021	127,25		106,88		119,06	

*Sumber : Berita Resmi Statistik (Badan Pusat Statistik)*

## 2) Tingkat pengangguran terbuka

Tenaga Kerja adalah faktor kunci dan memegang peranan penting dalam pembangunan suatu daerah. Selain sebagai subjek dan objek pembangunan, sehingga perbaikan dari sisi ketenagakerjaan akan berpengaruh positif terhadap arah pembangunan. Perbaikan dari sisi ketenagakerjaan pada kondisi saat ini dapat dilihat dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pekerja terampil dan terdidik, pekerja penuh, kebijakan upah, dan faktor lain seperti mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan, kesehatan, dan kesadaran K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumut berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2021 sebesar 6,33 persen. Hal ini menunjukkan dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam orang penganggur. Pada Agustus 2021, TPT mengalami penurunan sebesar 0,58 persen poin dibandingkan Agustus 2020, namun mengalami peningkatan sebesar 0,32 persen poin dibandingkan dengan Februari 2021.

Pada Agustus 2021, TPT perkotaan (8,35 persen) lebih tinggi lebih dari dua kali TPT di daerah perdesaan (3,96 persen). Sedangkan menurut kategori pendidikan, TPT dari tamatan SMK merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan

lainnya yaitu sebesar 8,36 persen. Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 3,71 persen.

Sementara itu, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu, Pengangguran karena Covid-19, bukan angkatan kerja (BAK) karena COVID-19; sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

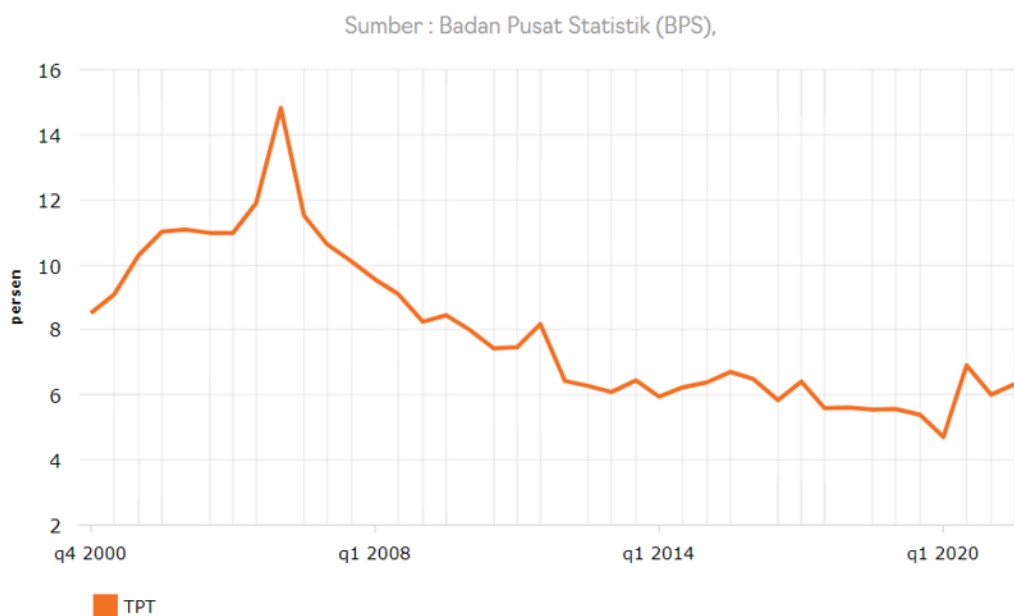
Penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 pada Agustus 2021 sebanyak 814 ribu orang, mengalami kenaikan sebanyak 120 ribu orang atau sebesar 14,74 persen dibandingkan dengan Februari 2021.

Komposisi penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari 84 ribu orang pengangguran karena Covid-19; 28 ribu orang Bukan Angkatan Kerja (BAK) karena Covid-19; 59 ribu orang sementara tidak bekerja karena Covid-19; dan 643 ribu orang penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Keempat komponen tersebut mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2021 kecuali komponen Bukan Angkatan Kerja karena COVID-19. Kenaikan terbesar adalah komponen penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19 sebanyak 80 ribu orang.

Dilihat dari daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-19 terdiri dari penduduk perkotaan sebanyak 598 ribu orang dan penduduk perdesaan sebanyak 216 ribu orang pada Agustus 2021.

Grafik 3.1  
Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara (2010-2021)



Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

### 3) **Pertumbuhan PDRB**

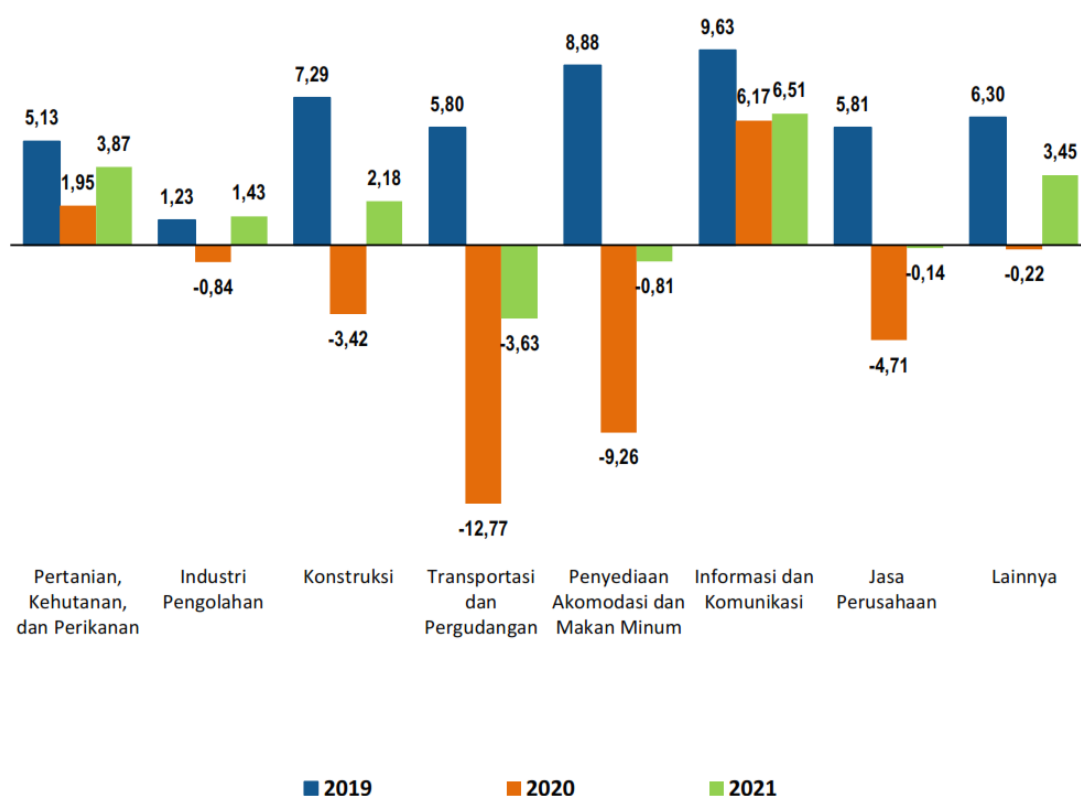
Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 859,87 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp. 547,65 triliun.

Ekonomi Sumatera Utara kumulatif Triwulan IV-2021 terhadap triwulan III-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 0,18 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,60 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah merupakan komponen dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 1,88 persen.

Ekonomi Sumatera Utara sampai dengan triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 2,61 persen (*c-to-c*). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 6,51 persen. semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif Okecuali transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 3,63 persen. penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami kontraksi sebesar 0,81 persen, dan jasa perusahaan mengalami kontraksi sebesar 0,14 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 15,09 persen. Struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada tahun 2021 didominasi oleh beberapa provinsi diantaranya Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Pulau Sumatera sebesar 23,37 persen, Provinsi Riau sebesar 22,92 persen; Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,36 persen, dan Provinsi Lampung sebesar 10,11 persen. Sementara kontribusi terendah adalah Provinsi Bengkulu sebesar 2,16 persen.



Grafik 3.2.  
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2021 (*c-to-c*)



Berita Resmi Statistik, Sumber Data : Badan Pusat Statistik (BPS)

### Persentase Kemiskinan

Persentase penduduk miskin Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,52 poin yaitu dari 9,01 persen pada Maret 2021 menjadi 8,49 persen pada September 2021. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,27 juta jiwa pada September 2021, atau berkurang sekitar 70,8 ribu jiwa dalam satu semester terakhir. Persentase penduduk miskin pada September 2021 di daerah perkotaan sebesar 8,68 persen, dan di daerah pedesaan sebesar 8,26 persen. Daerah perkotaan mengalami penurunan sebesar 0,47 poin, sedangkan daerah pedesaan berkurang sebesar 0,58 poin jika dibanding Maret 2021. Garis kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar Rp. 537.310,00/kapita/bulan dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar Rp. 404.860,00 (75,35) dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp. 132.451,00 (24,65%).

Pada Maret 2021 – September 2021, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan penurunan dan sebaliknya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan sedikit peningkatan. P1 turun dari 1,522 pada Maret 2021 menjadi 1,450 pada September 2021, dan P2 naik dari 0,327 menjadi 0,382. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata

pengeluaran penduduk miskin cenderung meningkat dan semakin mendekati garis kemiskinan, penurunan kedalaman kemiskinan ini juga terjadi pada Maret 2021 lalu. Keadaan sebaliknya pada tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin sedikit meningkat, dimana pada periode Maret 2021 sempat menurun.

Tabel 3.6.  
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>) di Sumatera Utara, September 2020 – September 2021

Tahun	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Indeks Kedalaman Kemiskinan (P<sub>1</sub>)</b>			
September 2020	1,540	1,671	1,599
Maret 2021	1,505	1,544	1,522
September 2021	1,400	1,513	1,450
<b>Indeks Keparahan Kemiskinan (P<sub>2</sub>)</b>			
September 2020	0,386	0,535	0,453
Maret 2021	0,369	0,386	0,376
September 2021	0,342	0,432	0,382

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2020, Maret 2021 dan September 2021

#### 4) Indeks Gini

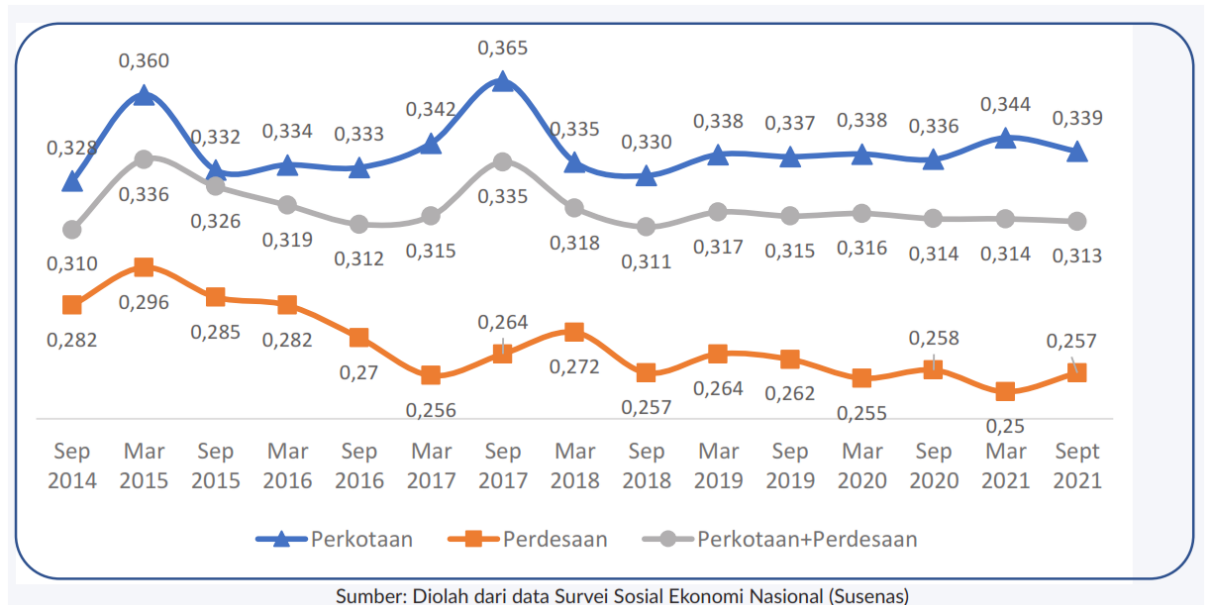
Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada September 2021, (tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan) Gini Ratio Sumatera Utara tercatat sebesar 0,313. Angka ini menurun sebesar 0.001 point jika dibandingkan baik dengan Gini Ratio Maret 2021 dan Gini Ratio September 2020 yang angkanya sama-sama sebesar 0,314.

Gini ratio di daerah perkotaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,339 cukup menurun sebesar 0,005 poin dibanding Gini ratio Maret 2021 yang sebesar 0,344. Sebaliknya, Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2021 tercatat sebesar 0,257 meningkat 0,007 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,250.

Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2021 adalah sebesar 21,78 persen. Artinya pengeluaran penduduk masih berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,50 persen dan di daerah perdesaan angkanya tercatat sebesar 24,33 persen yang artinya keduanya juga berada pada kategori ketimpangan rendah.

Grafik 3.3.  
Perkembangan Gini Ratio Sumatera Utara, September 2014-September 2021



Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*sangat baik*". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Rasio Rumah Layak Huni**

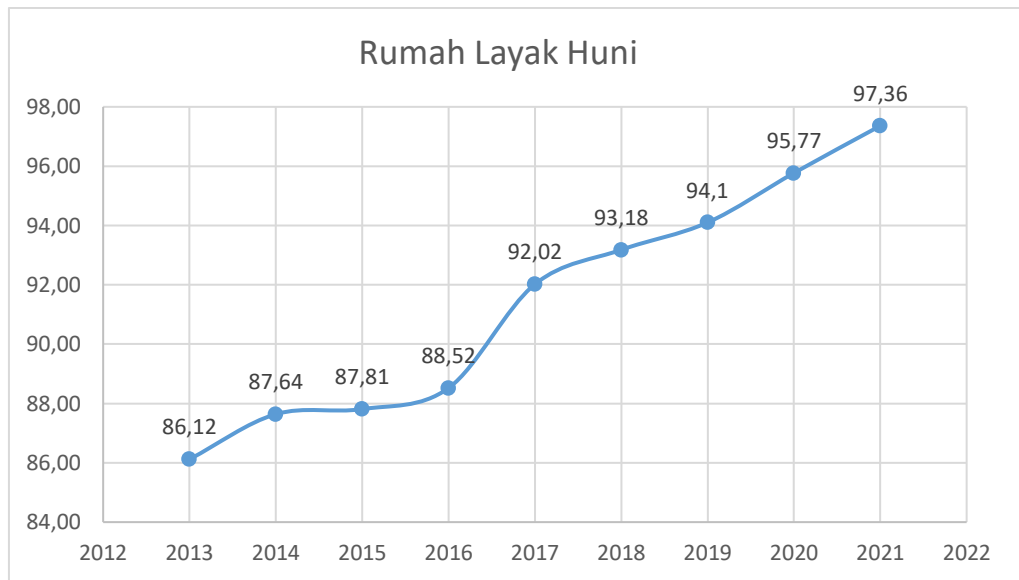
Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

1. Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi;
2. Sumber air minum layak;
3. Sanitasi layak;
4. Sumber penerangan listrik;
5. Jenis atap bukan dari daun atau lainnya;
6. Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya;
7. Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni.

Gambar memperlihatkan perkembangan rasio rumah layak huni di Sumatera Utara. Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat dari 86,12 % tahun 2013 menjadi 93,18 % ditahun 2018. Artinya dari 3.332.796 rumah yang ada, masih terdapat sekitar 227.296 rumah yang membutuhkan penanganan agar menjadi rumah yang layak huni.

Grafik 3.4.  
Rumah Layak Huni



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2013-2021

Terdapat perbedaan definisi rumah layak huni antara BPS dengan Bappenas. Dalam RPJMN 2020 – 2024, Pemerintah pusat melalui Bappenas dan Kementerian PUPR menggunakan empat indikator akses rumah layak huni, yaitu :

1. Ketahanan bangunan; yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai memenuhi syarat;
2. Memiliki akses air minum layak;
3. Kecukupan luas tempat tinggal; luas lantai per kapita > 7,2 m;
4. Memiliki akses sanitasi layak berupa fasilitas BAB pribadi / bersama, kloset leher angsa atau pembuangan akhir tinja di septic tank / Sistem Pembuangan Air Limbah.

Sesuai hasil olahan data susenas tahun 2017 hanya 34,24% rumah tangga di Indonesia memiliki akses terhadap rumah layak huni sesuai dengan indikator kelayakan. Jumlah rumah di Provinsi Sumatera Utara yang memenuhi keempat kriteria rumah layak huni tersebut adalah 40,44 %. Pada tahun 2020 Pokja PPAS Sumatera utara telah membuat baseline akses rumah layak huni sebesar 53,55%.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pendataan rehabilitasi rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 dilaksanakan di :

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Unit
1	Kabupaten Batu Bara	50
2	Kabupaten Asahan	50
3	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	50
4	Kabupaten Labuhan Batu Utara	100
5	Kabupaten Serdang Bedagai	50
6	Kabupaten Dairi	50
7	Kabupaten Simalungun	100
8	Kabupaten Padang Lawas	50
9	Kabupaten Tapanuli Utara	50
10	Kabupaten Tapanuli Tengah	50
<b>Total</b>		<b>600 Unit</b>

*Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu*

Realisasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021 dilakukan pengukuran kinerja, pengukuran kinerja dilakukan setelah pembangunan konstruksi selesai dilaksanakan pada akhir triwulan IV. Saat ini proses rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah dilaksanakan dengan progres fisik dilapangan mencapai 100 % walaupun di beberapa daerah terdapat kendala cuaca dan bencana banjir dan sudah diserahkan ke masyarakat untuk dapat dihuni oleh penerima bantuan dengan baik dan layak huni.

Melalui pembiayaan APBN yang dilakukan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera II Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah dilakukan peningkatan kualitas hunian masyarakat dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Penerima Program BSPS rumah yang tersebar di :

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Unit
1	Kabupaten Deli Serdang	1.150
2	Kabupaten Humbang Hasundutan	1.000
3	Kabupaten Tapanuli Utara	1.660
4	Kabupaten Samosir	650
5	Kabupaten Karo	1.171
6	Kabupaten Serdang Bedagai	300
7	Kabupaten Simalungun	39
8	Kabupaten Toba	150

*Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu*

Grafik 3.5.  
Realisasi Indikator Kinerja Akses Rumah Layak huni tahun 2021 adalah 69,5 %



Sumber Data : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu

Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian "*sangat baik*". Indikator dimaksud adalah:

#### 1. **Usia Harapan Hidup (UHH)**

Usia harapan hidup mempresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2011 – 2021, provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan usia harapan hidup saat lahir sebesar 1,60 tahun, dirata-ratakan usia harapan hidup tumbuh sebesar 0,23 persen per tahun. Pada tahun 2011, usia harapan hidup saat lahir sebesar 67,63 tahun, dan pada tahun 2021 telah mencapai 69,23 tahun. Seiring dengan erjadinya pandemi Covid-19, Usia Harapan Hidup Sumatera Utara tahun 2020 dan 2021 mengalami perlambatan.

#### 2. **Total Fertility Rate (TFR)**

Kelahiran merupakan faktor penyebab besarnya jumlah penduduk, angka kelahiran yang tinggi akan menyebabkan masalah ledakan penduduk. Daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, tidak menjamin tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut lebih tinggi pula. Angka kelahiran adalah indikator yang sangat penting didalam melaksanakan perencanaan pengendalian penduduk.

Total Fertility Rate (TFR) adalah taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia mereka pada saat sekarang. Angka ini dapat menjawab pertanyaan : berapa rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya.



Pada tahun 2021 target Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2,60 persen dapat diartikan bahwa setiap perempuan pada usia subur di Provinsi Sumatera Utara melahirkan tidak lebih dari 3 (tiga) orang anak tapi belum cukup mencapai target program Keluarga Berencana (KB) yaitu 2 (dua) orang anak.

Jumlah angka kelahiran di Sumatera Utara sudah mengalami penurunan akan tetapi belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

1. Penggunaan alat kontrasepsi masih rendah;
2. Tingginya angka putus pakai alat kontrasepsi;
3. Kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB).

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja dengan capaian "*sangat baik*". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Tingkat kemantapan jalan Provinsi**

Pada tahun 2021 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi melakukan pembangunan jalan sepanjang 29,65 km, rekonstruksi jalan sepanjang 1,4 km dan pemeliharaan ritun jalan provinsi sepanjang 1.282 km.

Kemantapan jalan provinsi diukur berdasarkan persentase panjang jalan provinsi dalam kondisi baik dan sedang dibandingkan panjang jalan provinsi secara keseluruhan.

Acuan yang digunakan untuk mengukur kemantapan jalan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 13/PRT/M/2011 Tanggal 3 Oktober 2011, Pasal 1 Butir 14 dan Lampiran – Kriteria Teknis Pemeliharaan Jalan butir 2 Tabel Penentuan Kondisi Ruas Jalan (B, S, RR, RB) Berdasarkan Nilai RCI atau IRI vs Lalu Lintas (LHRT).

Salah satu standar parameter yang kita gunakan untuk mengetahui nilai kondisi jalan berdasarkan Road Condition Survey (RCS) adalah parameter *Surface Distres Index* (SDI). *Surface Distress Index* (SDI) merupakan skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi di lapangan. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Baik dan Sedang, dan dikategorikan dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Pengukuran kemantapan jalan provinsi menggunakan survey kondisi jalan oleh konsultan.

Panjang jaringan jalan di provinsi sumatera utara pada saat ini sepanjang 39.376,25 km yang terdiri dari jalan nasional sepanjang 2.632,22 km. Jalan provinsi sepanjang 3.005,65 km dan jalan kabupaten/kota sepanjang 33.738,38 km.

Pada akhir tahun 2021 capaian kemantapan jalan adalah sebesar 76,37% dimana terjadi penurunan target kinerja sebesar 9,92% dari target sebelum perubahan adalah

86,29%. Pada tahun 2020 hasil survey yang telah dilakukan dengan menggunakan parameter *International Roughness Index* (IRI) dengan menggunakan alat NAASRA (*National Association of Australian State Road Authorities*/Asosiasi Nasional Otoritas Jalan Negara Bagian Australia), diperoleh tingkat kemantapan jalan provinsi yang dicapai Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara senilai 82,27% dan survey yang dilakukan dengan metode *Road Condition Survey* (RCS) secara visual, menggunakan parameter *Surface Distress Index* (SDI) untuk jalan beraspal dan parameter *Road Condition Index* (RCI) untuk jalan dengan permukaan sirtu dan tanah, dengan menghasilkan hasil kemantapan yang berbeda, yakni Mantap sebesar 75,02%, dan angka ini menjadi *baseline* dalam pengelolaan penanganan jalan provinsi untuk tahun 2021. Perubahan target ini diakibatkan adanya perubahan metode survey yang digunakan, namun tidak mengakibatkan penurunan kualitas hasil survey.

Adapun hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya kinerja jalan mantap adalah:

1. Kejadian bencana alam dan longsor, yang sekaligus mengakibatkan penurunan kemantapan jalan;
2. Alokasi pendanaan yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang ada dalam perencanaan;
3. Belum maksimalnya penanganan pemeliharaan jalan, terutama jalan dalam kondisi sedang akibat keterbatasan anggaran;
4. Belum tertatanya saluran drainase secara baik pada ruas jalan provinsi;
5. Sulitnya proses pembebasan lahan terkait penanganan jalan dan jembatan;
6. Banyaknya kendaraan dengan tonase berlebih yang melintas di ruas jalan provinsi;
7. Perubahan metode survey jalan yang mengakibatkan perubahan target kinerja kemantapan jalan.

Adapun rencana tindak lanjut terkait permasalahan diatas, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi akan melakukan :

1. Optimalisasi penggunaan dana untuk mempertahankan fungsi jalan guna mendukung program dan kegiatan berikutnya;
2. Mengupayakan sumber pendanaan lain selain APBD dalam penanganan jalan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terkait pembebasan lahan khususnya pada ruas jalan Provinsi Sumatera Utara;

4. Koordinasi dengan dinas dan kementerian terkait kendaraan yang mengangkut muatan berlebih (*Over dimension and over loading/ODOL*);
5. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa, berkoordinasi dengan UKPBJ Provinsi Sumatera Utara.

➤ **Rasio Elektrifikasi**

Usaha penyediaan tenaga listrik adalah usaha pengadaan tenaga listrik yang ruang lingkupnya meliputi pembangkitan, transmisi dan distribusi serta konsumen selaku pengguna tenaga listrik. Pengembangan penyediaan tenaga listrik disesuaikan dengan laju pembangunan untuk mempertahankan pasokan tenaga listrik yang merata dan bermutu.

Ketersediaan energi listrik daerah dapat dilihat dari 2 sisi yang berbeda, yaitu :

a. Sisi Pasokan (*Supply side*) Energi Listrik

Sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari sistem dengan transmisi 150 kV dan 275 kV serta sistem kecil isolated Pulau Nias dengan tegangan 70 kV. Interkoneksi sistem tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero) yang meliputi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Interkoneksi Sumbagut dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Adapun kapasitas Pembangkit Pada tahun 2020 sebesar 3.447,3 MW. Pada tahun 2021 Kondisi Kelistrikan Sistem Tenaga Listrik di Provinsi Sumatera Utara dengan Kapasitas Pembangkit Eksisting sebesar 3943,3 MW dan Daya Mampu Pembangkit 3.266,8 MW.

Cakupan Wilayah Kerja PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara meliputi seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 72.981 km<sup>2</sup>. Pada wilayah kerja tersebut, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara melakukan kegiatan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik untuk pelanggan sosial, rumah tangga, bisnis, industri, dan publik serta kegiatan pembangkitan pada daerah-daerah yang masih dilayani secara isolated dengan dipasok oleh pembangkit listrik tenaga diesel.

Selain PT. PLN (Persero), pihak investor juga mempunyai peran dalam penyediaan kelistrikan di Sumatera Utara melalui wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Wilayah usaha tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Usaha PT. Mabar Elektrindo yang berlokasi di Kawasan Industri Medan;

2. Wilayah Usaha PT. Perkebunan Nusantara III yang berlokasi di KEK Sei Mangke Kab. Simalungun.

Beberapa hal yang dapat menyebabkan belum maksimalnya kemampuan pasokan pembangkit, antara lain:

1. masih adanya pembangkit *eksisting* yang sudah berumur di atas 20 tahun khususnya di pembangkit sektor Belawan dan Medan sehingga rentan mengalami kerusakan;
2. kapasitas pembangkit yang relatif kecil tidak efisien dan teknologi sudah *out of date*, dibandingkan dengan pembangkit teknologi baru.

b. Sisi Kebutuhan (*Demand side*) Energi Listrik

Kondisi Kebutuhan daya listrik Tahun 2020 beban puncak menurun menjadi 1859 MW dan Cadangan meningkat menjadi 1292 MW (69%). Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, menyebabkan pertumbuhan ekonomi hingga beberapa tahun kedepan menjadi tertekan. Turunnya penggunaan daya listrik (beban puncak) yang disebabkan oleh pandemi covid-19 yang mengakibatkan kurangnya penggunaan/konsumsi daya listrik terkhusus sektor industri dan bisnis. Pada tahun 2021 beban puncak tertinggi terjadi di bulan Oktober yaitu 1.956 MW sedangkan beban puncak rata-rata tahun 2021 berada pada 1.897 MW.

Pada tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan kegiatan pembangunan listrik pedesaan bagi masyarakat kurang mampu di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan dimaksud adalah:

1. Pemasangan Sambungan Listrik Baru Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu  
Maksud dilaksanakannya pekerjaan ini adalah memberikan bantuan sambungan rumah listrik PLN beserta instalasi listrik bagi keluarga kurang mampu yang belum memiliki kWh meter sendiri. Hasilnya adalah terpasangnya sambungan listrik baru beserta instalasi listrik dengan daya sebesar 450 VA bagi masyarakat tidak mampu sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) sambungan yang tersebar di 13 Kabupaten, 54 Kecamatan dan 159 Desa di Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.7.  
Bantuan Sambungan Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu Tahun 2021

No.	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Penerima Bantuan (KK)
1.	Secanggang	Langkat	84
2.	Wampu		16
Sub Total			100
1.	Kutabuluh	Karo	38
2.	Laubaleng		34
3.	Mardingding		21
4.	Berastagi		7
Sub Total			100
1.	Tanah Pinem	Dairi	2
2.	Siempat Nempu Hilir		55
3.	Sumbul		43
Sub Total			100
1.	Sianjur Simula-Mula	Samosir	30
2.	Nainggolan		6
3.	Ronggur Nihuta		6
4.	Simanindo		8
Sub Total			50
1.	Tarutung	Tapanuli Utara	5
2.	Siatas Barita		4
3.	Pahae Julu		12
4.	Pahae Jae		7
5.	Adiankoting		13
6.	Parmonangan		5
7.	Sipoholon		4
Sub Total			50
1.	Lima Puluh	Batubara	32
2.	Medang Deras		16
3.	Air Putih		2
Sub Total			50
1.	Kualuh Leidong	Labuhanbatu Utara	25
2.	Kualuh Hilir		29
3.	Na IX-X		1
4.	Marbau		4
5.	Aek Kuo		1
6.	Kualuh Hulu		13
7.	Kualuh Selatan		27
Sub Total			100

No.	Kecamatan	Kabupaten	Jumlah Penerima Bantuan (KK)
1.	Sei Kepayang	Asahan	29
2.	Buntu Pane		8
3.	Pulo Bandring		4
4.	Aek Kuasan		7
5.	Pulau Rakyat		2
Sub Total			50
1.	Bilah Hilir	Labuhanbatu	38
2.	Panai Hulu		34
Sub Total			100
1.	Sipirok	Tapanuli Selatan	17
2.	Arse		24
3.	Angkola Barat		16
4.	Sayur Matinggi		35
5.	Batang Angkola		8
Sub Total			100
1.	Panyabungan Timur	Mandailing Natal	85
2.	Ulu Pungkut		95
Sub Total			180
1.	Portibi	Padang Lawas Utara	48
2.	Padang Bolak		42
3.	Podang Bolak Tenggara		10
Sub Total			100
1.	Sosopan	Padang Lawas	35
2.	Sosa		6
3.	Aek Nabara Barumun		7
4.	Barumun		2
5.	Huta Raja Tinggi		15
Sub Total			65
Total			1.145

## 2. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH)

Pada Tahun 20021 dilaksanakan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebanyak 1 (satu) unit di Desa Menanti kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, untuk penerangan pada 4 (empat) desa yaitu Desa Menanti, Desa Paran Padang, desa Rahuning Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara dan Desa Rahuning Julu Kecamatan Saipar Dolok Hole Kabupaten Tapanuli Selatan. PLTMH ini Berkapasitas 80 kW dengan jumlah sambungan adalah 120 unit.

3. Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat

Pembangunan Solar Panel Surya Daya 24 Kwp Hibrid Dengan Pompa Air Tenaga Listrik PLN mendukung program terintegrasi produksi padi (8 Ton/Tahun) yang berlokasi dikoordinat  $2^{\circ}28'50.23''\text{U}$  dan  $98^{\circ}48'0.82''\text{T}$  tepatnya di Desa Palipi Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir. Modul yang dipasang sebanyak 76 unit dengan kapasitas masing-masing adalah sebesar 325 Wp, sehingga kapasitas total adalah sebesar 24.700 Wp atau sebesar 24,7 kWp, berdasarkan data dari globalatlas bahwa estimasi Power output di lokasi tersebut sebesar 3,596 kWh/kWp, sehingga estimasi daya yang dihasilkan perhari sebesar 88.8 kWh, sebulan sebesar 2664 kWh. Dan berlokasi dikoordinat  $2^{\circ}38'45.58''\text{U}$  dan  $98^{\circ}41'2.87''\text{T}$  tepatnya di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Modul PLTS 68 unit dengan kapasitas masing-masing adalah sebesar 330 Wp, sehingga kapasitas Total adalah sebesar 22.440 Wp. Pompa celup (Submersible) yang digunakan berdaya 15 kW dengan debit maksimal 235 m<sup>3</sup>/jam dengan jalur pipa lebih kerang 600 meter dan ketinggian lebih kurang 10 meter, Pompa yang dipasang diestimasi dapat menghasilkan air sebesar 1000 m<sup>3</sup> /hari.

Selain itu, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya terpusat untuk Penggunaan Produktif dilaksanakan juga di Kabupaten Serdang Bedagai berlokasi  $2^{\circ}38'45.58''\text{U}$  dan  $98^{\circ}41'2.87''\text{T}$  tepatnya di Desa Sei Rampah Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai.

Modul Surya sebanyak 100 unit dengan kapasitas masing-masing adalah sebesar 330 Wp, sehingga kapasitas total adalah sebesar 33.000 Wp. Pompa Permukaan (*Surface Pump*) berikut kontrolernya memiliki daya 21 kW dengan debit maksimal 306 m<sup>3</sup>/jam dengan jalur pipa lebih kurang 3 meter dan ketinggian lebih kurang 6 meter, pompa yang dipasang diestimasi dapat menghasilkan air 2000 m<sup>3</sup>/hari, estimasi kebutuhan air sawah sebesar 0,7 – 1,5 l/dtk maka sawah yang dapat dialiri berkisar 14-29 ha.

4. Pembangunan SHS/PLTS di Desa Terpencil di Sumatera Utara

PLTS adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi listrik untuk penerangan. Pada Tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah membangun PLTS/SHS sebanyak 93 Unit di 3 Kabupaten 3 Kecamatan, yaitu :



Tabel 3.8.  
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Unit
1.	Kabupaten Tapanuli Utara	Parmonangan	Desa Hutajulu Parbalik	53
2.	Kabupaten Nias	Kecamatan Bawolato	Dusun IV Hogumbaruzo, Desa Hilihuru	20
3.	Kabupaten Mandailing Natal	Kelurahan Tamiang	Dusun Pagaran Dolok Lingkungan V	20
Total				93

Pada Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral juga telah membangun sebanyak 90 unit yang berlokasi di :

Tabel 3.9.  
Pembangunan Penerangan Umum Tenaga Surya

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Unit
1.	Medan	Medan Deli		50
			Mabar Hilir	4
			Tanjung Mulia	3
			Titi Papan	2
2.	Langkat	Sei Lapan	Perkampungan Kasih Sayang RT.03 Darussalam Dusun III Darat Hulu, Desa Telaga Said	9
3.	Karo	Tigapanah	Sukadame	9
4.	Dairi	Tigalingga	Tigalingga	18
			Sarintonu	
		Tanah Pinem	Desa Tanah Pinem	
		Siempat Nempu Hulu	Dea Lae Nuaha	
		Sidikalang	Desa Kalang	
			Kelurahan Huta Gambir	
5.	Simalungun	Dolok Pardamean	Pantai Arofan Desa Togu Domu Nauli	9
6.	Batubara	Kecamatan Nibung Hangus	Istana Lima Laras Desa Lima Laras	9
7.	Tapanuli Utara	Tarutung	Kelurahan Tarutung	9

No.	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/ Desa	Jumlah Unit
8.	Tapanuli Tengah	Barus	Objek Wisata Titik Nol, Kelurahan Pasar Batu Gerigis, Desa Pasar Terendam dan Desa Kampung Solok	9
9.	Padang Lawas	Barumon	instalasi pembibitan ternak sapi potong Dinas Peternakan Provsu Desa Tanjung Beringin	9
Jumlah				90

Tabel 3.10  
Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Tahun 2021				
	Target		Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)
	Volume	Satuan	Volume	Satuan	
Rasio Elektrifikasi	100	%	99,82	%	99,82%

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*sangat baik*". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Inflasi**

Desember 2021, seluruh Indeks Harga Konsumen di Sumatera Utara tercatat inflasi, yaitu Sibolga sebesar 0,17 persen; Pematangsiantar sebesar 0,85 persen; Medan sebesar 0,44 persen; Padangsidimpuan sebesar 0,35 persen; dan Gunung Sitoli sebesar 0,62 persen. Dengan demikian, gabungan 5 (lima) kota, indeks harga konsumen di Sumatera Utara pada Desember 2021 inflasi sebesar 0,46 persen.

Inflasi Desember 2021 menyebabkan inflasi tahun kalender (Desember 2021 terhadap Desember 2020) dan inflasi tahun ke tahun (Desember 2021 terhadap Desember 2020) masing-masing kota sebagai berikut ; Sibolga inflasi 1,86 persen; Pematangsiantar inflasi 2,12 persen; Medan inflasi 1,70 persen; Padangsidimpuan inflasi 1,49 persen; dan Gunung Sitoli inflasi 0,54 persen. Dengan demikian, inflasi tahun kalender gabungan 5 (lima) kota IHK di Sumatera Utara sebesar 1,71 persen.

Tabel 3.11.  
Tingkat Inflasi Desember 2021, Tahun Kalender dan Tahun ke Tahun 5 Kota IHK di Sumatera Utara (2018=100)

Kota	IHK Desember 2020	IHK November 2021	IHK Desember 2021	Tingkat Inflasi Desember 2021 <sup>1)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2021 <sup>2)</sup> (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun <sup>3)</sup> (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sibolga	106,17	107,97	108,15	0,17	1,86	1,86
Pematangsiantar	105,55	106,88	107,79	0,85	2,12	2,12
Medan	104,15	105,46	105,92	0,44	1,70	1,70
Padangsidempuan	107,08	108,30	108,68	0,35	1,49	1,49
Gunung Sitoli	107,85	107,76	108,43	0,62	0,54	0,54
<b>Gabungan 5 Kota IHK di Sumatera Utara</b>	<b>104,48</b>	<b>105,78</b>	<b>106,26</b>	<b>0,46</b>	<b>1,71</b>	<b>1,71</b>

Keterangan: <sup>1)</sup> Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK November 2021.  
<sup>2)</sup> Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020.  
<sup>3)</sup> Persentase perubahan IHK Desember 2021 terhadap IHK Desember 2020.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*sangat baik*". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Sumatera Utara 2021 adalah sebesar 72,00 atau tumbuh 0,32 persen (meningkat 0,23 poin) dibanding capaian IPM 2020. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan di semua komponen penyusunannya. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya. Pada 2020 pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada 2021, pengeluaran per kapita telah merangkak naik 0,76 persen dibanding 2020.

Dari sisi pendidikan, pada 2021 anak-anak berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,27 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan 0,04 tahun dibandingkan 2020 yang mencapai 13,23 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,04 tahun, dari 9,54 tahun menjadi 9,58 tahun pada 2021.

Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 69,23 tahun, lebih lama 0,13 tahun dibanding dengan yang lahir pada tahun sebelumnya.

Tabel 3.12  
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Utara Menurut Komponen,  
2011-2021

Komponen	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	67,63	67,81	67,94	68,04	68,29	68,33	68,37	68,61	68,95	69,10	69,23
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,83	11,97	12,41	12,61	12,82	13,00	13,10	13,14	13,15	13,23	13,27
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,61	8,72	8,79	8,93	9,03	9,12	9,25	9,34	9,45	9,54	9,58
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp 000	9.231	9.266	9.309	9.391	9.563	9.744	10.036	10.391	10.649	10.420	10.499
IPM		67,34	67,74	68,38	68,87	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74	71,77	72,00

*Sumber Data : Berita Resmi Statistik (BPS)*

**Misi 2 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Misi II ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik. Indikator dimaksud adalah :

**1. Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah**

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini terkait dengan target pemerintah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas 4 (empat) tahapan

penilaian yaitu Laporan Keuangan harus sesuai standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan.

Ada 3 (tiga) jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya opini, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan untuk melihat apakah sudah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aturan ini menganut basis *accrual*, dimana aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis *accrual*.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Tahun 2021 belum diterima, karena pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru dilaksanakan pada bulan Januari 2021 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan akan disampaikan pada bulan Mei tahun berjalan.

## 2. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2021 adalah B. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2022 adalah merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Namun sampai saat penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah ini, hasil evaluasi yang dilaksanakan Tahun 2021 belum keluar.

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	35	22,43	
b.	Pengukuran Kinerja	20	16,72	
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,11	
d.	Evaluasi Internal	10	6,06	
e.	Capaian Kinerja	20	8,47	
	Nilai Hasil Evaluasi	100	<b>62,79</b>	
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>B</b>	

**Misi 3** : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Misi III ini terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis dan diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "Sangat Baik". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Angka Rata-rata Lama Sekolah**

Pada tahun 2021 rata-rata lama sekolah mencapai 9,58 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa secara rata-rata penduduk Sumatera Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan sampai kelas IX atau setara pada kelas 3 jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Tabel 3.13.  
Rata-rata Lama Sekolah

No.	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	
		2020	2021
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>9,54</b>	<b>9,58</b>
1	Nias	5,36	5,64
2	Mandailing Natal	8,62	8,63
3	Tapanuli Selatan	9,28	9,29
4	Tapanuli Tengah	8,62	8,84
5	Tapanuli Utara	9,85	9,99
6	Toba Samosir	10,52	10,57
7	Labuhan Batu	9,24	9,25
8	Asahan	8,79	8,8
9	Simalungun	9,6	9,61
10	Dairi	9,58	9,59
11	Karo	9,79	10
12	Deli Serdang	10,09	10,1
13	Langkat	8,65	8,66
14	Nias Selatan	5,85	6,06
15	Humbang Hasundutan	9,54	9,71
16	Pakpak Bharat	9,03	9,14
17	Samosir	9,43	9,44
18	Serdang Bedagai	8,54	8,69
19	Batu Bara	8,06	8,07

20	Padang Lawas Utara	9,37	9,38
21	Padang Lawas	9,01	9,02
22	Labuhan Batu Selatan	8,75	8,9
23	Labuhan Batu Utara	8,4	8,41
24	Nias Utara	6,58	6,77
25	Nias Barat	6,49	6,69
26	Kota Sibolga	10,4	10,41
27	Kota Tanjung Balai	9,44	9,45
28	Kota Pematang Siantar	11,16	11,29
29	Kota Tebing Tinggi	10,31	10,44
30	Kota Medan	11,39	11,48
31	Kota Binjai	10,93	10,94
32	Kota Padangsidimpuan	11	11,09
33	Kota Gunungsitoli	8,61	8,62

**Misi 4 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Misi IV ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : terwujudnya masyarakat sumatera utara yang bermartabat dalam pergaulan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*Baik*". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Indeks Ketentraman dan Ketertiban**

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan itu maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2021 adalah 1,67 poin. Pada tahun 2021 jumlah kasus pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan yang tertangani sebanyak 83 kali, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 56 kali menjadi 139 kali. Hal ini dikarenakan karena keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan kasus COVID-19 dan dukungan kebijakan stimulus ekonomi. Percepatan program vaksinasi di tahun 2021 serta program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC PEN) telah terbukti efektif dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*Sedang*". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan**

Pemahaman wawasan kebangsaan diberikan untuk menumbuhkan rasa berbangsa dan bernegara. Dengan adanya pemahaman masyarakat akan wawasan kebangsaan diharapkan rasa persaudaraan dan kebersamaan diantara masyarakat dapat lebih baik lagi. Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan pembauran melalui pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan peningkatan Kesadaran Bela Negara.

Bela negara, menjadi hal dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Hal ini berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1. Dari kedua ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Bela Negara merupakan Hak dan Kewajiban Konstitusional WNI. Semua anak bangsa harus tergerak dan bergerak untuk bela negara sesuai dengan ladang pengabdian masing-masing.

Adapun nilai-nilai dasar yang dikembangkan dalam bela negara, agar menjadi landasan sikap dan perilaku warga negara adalah cinta Tanah Air, sadar berbangsa dan negara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta kemampuan awal bela negara.

Untuk kegiatan ini, dilaksanakan upacara HUT Bela Negara di Aula Tengku Rizal Nurdin yang diikuti 100 orang peserta, terdiri dari Forum Bela Negara, FORKOPIMDA, Organisasi Pemuda yaitu Pemuda Pancasila, Komite Nasional Pemuda Indonesia), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, dan Legiun Veteran Republik Indonesia. Selain itu, juga diadakan kegiatan Revolusi Mental diawali dengan Fasilitasi Kegiatan Latsitardanus (Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara) XLII Indonesia pada Bulan Maret s/d April 2021 yang dilaksanakan di Kab. Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Langkat, Binjai dan Simalungun, diikuti oleh 850 peserta Taruna dari Kepolisian, dan TNI serta Kesbangpol mengikutsertakan 100 peserta Mahasiswa dari perguruan tinggi di Sumatera Utara. Dilanjutkan dengan Gerakan Sumut Bersih di Sumatera Utara dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.54/38/INST/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Gerakan Sumut Bersih di Kawasan Wisata, melaksanakan *pilot project* di Kota Medan yaitu Istana Maimun dengan memberikan arahan kepada 150 orang pengunjung untuk menerapkan budaya bersih, menanam 100 pohon, memasang spanduk dan banner serta memasang tong sampah baru sesuai jenis sampahnya. Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Wawasan



Kebangsaan dengan peserta 50 orang, Sosialisasi wawasan kebangsaan di Kota Medan diikuti oleh anggota gugus tugas GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) dan Kesbangpol Kab/Kota dengan total jumlah peserta 100 orang yang bertujuan membentuk pola pikir masyarakat dan Tim Gugus Tugas GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) untuk tetap menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, Pembinaan dan Peningkatan Pembauran melalui Pemberdayaan FPK Provsu diikuti oleh 100 orang Masyarakat dan Anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provsu yang bertujuan meningkatkan rasa kebersamaan.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*Sangat Baik*". Indikator dimaksud adalah :

➤ **Indeks Pembangunan Gender**

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Capaian sebesar 90,67 poin pada tahun 2020, mengindikasikan bahwa upaya implementasi pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender di Provinsi Sumatera Utara berjalan cukup baik.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah keterwakilan kaum perempuan dalam pembangunan dan akses ekonomi serta keterwakilan perempuan di instansi pemerintahan, swasta, dan menjadi Pimpinan (pembuat keputusan) dan anggota parlemen mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pembangunan manusia Indonesia menurut kesadaran gender menunjukkan trend perbaikan, yang tercermin dari indeks pembangunan gender yang mendekati angka 100 yang menunjukkan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Tabel 3.14.  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2019-2020

No.	Provinsi dan Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Gender	
		2019	2020
1	2	3	4
1	<b>SUMATERA UTARA</b>	<b>90,71</b>	<b>90,67</b>
2	Nias	91,23	90,81
3	Mandailing Natal	93,62	93,24
4	Tapanuli Selatan	91,33	90,86
5	Tapanuli Tengah	94,78	94,85
6	Tapanuli Utara	98,04	97,98
7	Toba Samosir	98,14	97,96
8	Labuhan Batu	91,05	90,86
9	Asahan	91,22	91,51
10	Simalungun	93,03	93,02
11	Dairi	97,77	98,02
12	Karo	96,31	96,19
13	Deli Serdang	91,31	91,29
14	Langkat	89,52	89,24
15	Nias Selatan	87,59	87,58
16	Humbang Hasundutan	97,10	97,38
17	Pakpak Bharat	99,05	99,02
18	Samosir	96,54	96,51
19	Serdang Bedagai	88,79	88,74
20	Batu Bara	82,93	83,08
21	Padang Lawas Utara	87,63	87,92
22	Padang Lawas	85,64	85,75
23	Labuhan Batu Selatan	87,43	87,43
24	Labuhan Batu Utara	90,03	89,80
25	Nias Utara	79,02	79,37
26	Nias Barat	86,26	86,67
27	Kota Sibolga	97,53	97,63
28	Kota Tanjung Balai	89,51	89,69
29	Kota Pematang Siantar	95,46	95,65
30	Kota Tebing Tinggi	93,55	93,53
31	Kota Medan	94,02	94,00
32	Kota Binjai	90,60	90,57
33	Kota Padangsidimpuan	97,59	97,67
34	Kota Gunungsitoli	89,25	89,31

Sumber data : Badan Pusat Statistik (BPS)

**Misi 5 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Misi V ini terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis dan diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 2 (dua) indikator kinerja. Indikator dimaksud adalah :

### 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan indikator dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perhitungan IKLH tetap mengacu pada penghitungan tahun sebelumnya. Namun pada parameter IKTL terdapat penambahan parameter yaitu tutupan belukar dan belukar rawa pada kawasan hutan, kawasan yang memiliki fungsi lindung (lereng dengan kemiringan  $\geq 25\%$  dan sempadan sungai, danau dan pantai), ruang terbuka hijau, kebun raya, dan taman keanekaragaman hayati.

Tabel 3.15  
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Parameter	Target	Realisasi Kinerja (poin)	Capaian Kinerja (%)
<b>Indeks Kualitas Air (IKA)</b>	53,71	53,27	102,82
<b>Indeks Kualitas Udara (IKU)</b>	87,09	89,55	100,02
<b>Indeks Kualitas Lahan (IKL)</b>	47,42	48,84	102,99
<b>Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)</b>	72,51	81,43	112,30
<b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>	69,02	71,15	103,09

Sumber data : Dinas Lingkunga Hidup Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Capaian Kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dijelaskan sebagai berikut:

- **Indeks Kualitas Air**

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan dengan menggabungkan hasil pemantauan kualitas air yang dilakukan di 5 Sungai yaitu Sungai Percut, Sungai Bah Bolon, Sungai Wampu, Siungai Deli, Sungai Belawan dan Danau Toba.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021:

- Metode perhitungan Indeks Kualitas Air didasarkan pada metode perhitungan Indeks Pencemar Air Sebagaimana terdapat pada Lampiran I Permenlhk No. 27 Tahun 2021;
- Parameter yang wajib dianalisa meliputi: pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform
- Baku Mutu Acuan adalah Kelas I dan II PP No.82 Tahun 2001;
- Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2021 adalah : 53,72.

Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain:

- (a) Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air;
- (b) Ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global;
- (c) Penggunaan air; dan
- (d) Tingkat erosi dan sedimentasi.

- **Indeks Kualitas Udara**

Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub> dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada daerah yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran.

Perhitungan IKU provinsi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), Industri (B), area komersial (C), dan area pemukiman/perumahan (D);
- Menghitung rerata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> untuk masing-masing kota atau kabupaten yang merupakan perhitungan rata-rata dari ke empat titik pemantauan;
- Menghitung rata-rata parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> untuk provinsi yang merupakan perhitungan rerata dari kota atau kabupaten;
- Membandingkan nilai rata-rata NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> provinsi dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks NO<sub>2</sub> dan Indeks SO<sub>2</sub>. Rata-rata Indeks NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> menghasilkan Indeks Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara (IKU).

➤ **Indeks Kualitas Lahan (IKL)**

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). Kualitas ekosistem gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan.

Keberadaan tutupan hutan dalam skala lokal, ekosistem/ekoregion, regional dan global memiliki berbagai fungsi yakni sebagai habitat keanekaragaman hayati, menjaga kestabilan tanah, menurunkan beban pencemaran air, tanah dan pencemaran udara, pengatur air serta menjaga iklim mikro, makro dan resiko pemanasan global. Kemampuan dan kesesuaian lahan pada karakteristik lahan tertentu yang membutuhkan Tutupan Lahan berupa pepohonan, seperti pada sempadan sungai, pantai dan sekitar danau/waduk, lahan kemiringan lereng >25%. Karakteristik lahan tersebut juga dapat mewakili wilayah hulu dan hilir, dimana sempada sungai, sekitar danau/waduk dan lahan kemiringan lereng >25% pada umumnya terdistribusi di bagian tengah hingga ke hulu, sedangkan sempadan pantai di bagian hilir.

Berkaitan dengan arahan penggunaan lahan di wilayah perkotaan, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) peruntukan lahannya berupa ruang terbuka hijau. Peruntukan sebagai ruang terbuka hijau tersebut dapat berupa hutan kota paling sedikit 10% dari luas perkotaan, kebun raya, taman keanekaragaman hayati atau taman kota yang didominasi pepohonan. Penggunaan data citra satelit Landsat dalam analisis Tutupan Lahan, terdapat keterbatasan khususnya pada wilayah perkotaan sehingga diperlukan pendetailan data untuk pelaksanaan pemantauan kondisi ruang terbuka hijau dan rehabilitasi hutan dan lahan.

• **INDEKS KUALITAS AIR LAUT (IKAL)**

Indeks Kualitas Air Laut yang selanjutnya disingkat IKAL adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air laut yang merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas air laut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Nilai IKAL ini merupakan indeks baru yang melengkapi dan menguatkan pengukuran IKLH yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) nilai IKAL dapat digunakan untuk mendukung tujuan nomor 14 yaitu Ekosistem Laut. Kualitas air laut dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan di daerah pesisir dan laut. Perhitungan IKAL mengacu pada National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI), dengan menggunakan hasil analisis 5 (lima) parameter kunci:

Tabel 3.16  
Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)

No.	Parameter	Sumber	Alasan Penentuan Parameter
1.	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	Berbagai sumber	Berkaitan dengan proses fotosintesis dan estetika perairan
2.	Oksigen Terlarut (DO)	Domestik dan industri	Terkait pencemaran organik, potensi bahaya bagi biota
3.	Minyak dan Lemak		
4.	Amonia Total (N-NH <sub>3</sub> )	Domestik dan pertanian	Bersifat toksik
5.	Orto-fosfat (PO <sub>4</sub> -P)		Potensi eutrofikasi

## 2. Indeks Resiko Bencana

Provinsi Sumatera Utara secara geografis wilayahnya terbagi 3 (tiga) kelompok kawasan yaitu, Pantai Barat, Dataran Tinggi, dan Pantai Timur. Berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI), selama 10 (sepuluh) tahun terakhir bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Sumatera Utara adalah bencana banjir, puting beliung, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pengukuran indeks risiko bencana indonesia (IRBI) 2020 Provinsi Sumatera Utara memiliki kelas resiko tinggi dengan nilai 145,18 (tinggi). Pandemi Covid-19 juga merubah tatanan kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat Untuk itu, diharapkan masyarakat tetap waspada atas potensi ancaman bencana baik alam maupun non alam dan terus melaksanakan protokol kesehatan.

Tabel 3.17  
Skor Risiko Bencana di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

NO.	KABUPATEN	SKOR	KELAS RISIKO	NO.	KABUPATEN	SKOR	KELAS RISIKO
1	GUNUNGSITOLI	215.6	TINGGI	18	LABUHAN BATU SELATAN	131.2	SEDANG
2	MANDAILING NATAL	214.8	TINGGI	19	HUMBANG HASUNDUTAN	130.0	SEDANG
3	NIAS	214.0	TINGGI	20	PADANGSIDIMPUAN	128.0	SEDANG
4	NIAS UTARA	214.0	TINGGI	21	DAIRI	127.6	SEDANG
5	NIAS BARAT	210.8	TINGGI	22	DELI SERDANG	121.7	SEDANG
6	NIAS SELATAN	202.0	TINGGI	23	KARO	121.0	SEDANG
7	TAPANULI TENGAH	191.2	TINGGI	24	TAPANULI UTARA	118.0	SEDANG
8	TAPANULI SELATAN	186.0	TINGGI	25	SAMOSIR	114.0	SEDANG
9	ASAHAN	167.2	TINGGI	26	TANJUNG BALAI	114.0	SEDANG
10	SIBOLGA	167.2	TINGGI	27	PAKPAK BHARAT	112.0	SEDANG
11	LABUHAN BATU UTARA	155.2	TINGGI	28	TOBA SAMOSIR	107.2	SEDANG
12	PADANG LAWAS	154.0	TINGGI	29	BINJAI	103.2	SEDANG
13	LABUHAN BATU	151.2	TINGGI	30	TEBING TINGGI	101.6	SEDANG
14	BATU BARA	143.2	SEDANG	31	MEDAN	93.8	SEDANG
15	SERDANG BEDAGAI	140.0	SEDANG	32	PEMATANG SIANTAR	91.2	SEDANG
16	LANGKAT	138.6	SEDANG	33	SIMALUNGUN	73.6	SEDANG
17	PADANG LAWAS UTARA	138.0	SEDANG				

#### Klasifikasi Kelas Risiko Bencana

SKOR TOTAL	KELAS	KATEGORI RISIKO BENCANA
<13	1	RENDAH
13 - 144	2	SEDANG
> 144	3	TINGGI

Parameter yang digunakan dalam penyusunan Indeks Risiko Bencana Tahun 2020

- Hasil Kajian Risiko Bencana BNPB :
  - Indeks Bahaya, 2012
  - Indeks Jiwa Terpapar, 2012
  - Indeks Kerugian (Rupiah), 2012
  - Indeks Kerusakan Lingkungan (Ha), 2012
  - Indeks Kapasitas Daerah, 2020
- Peta Dasar, BIG
- Batas Administrasi BIG Tahun 2016

Sumber Data : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)

Sasaran Strategis 2 : meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Hasil pengukuran melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian "*Sangat Baik*". Indikator dimaksud adalah :

#### ➤ Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui 4 (empat) pintu masuk pada Semester I Tahun 2021 mengalami penurunan. Jumlah wisman di semester I 2021 yang sebanyak 205 itu anjlok 99,54 persen dari periode sama 2020 yang masih bisa sebanyak [44.140](#) orang. Anjloknya kunjungan wisman itu akibat masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Penurunan kunjungan wisman itu terjadi dari semua negara dan pintu masuk ke Sumatera Utara.

Dari Bandara Kualanamu, misalnya, kedatangan wisman di semester 1 2021 hanya 193 dari periode sama 2020 yang sebanyak 41.168. Dari Pelabuhan Belawan juga hanya 12 wisman dari periode sama 2020 yang sebanyak 23. Dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan dan Bandara Silangit, jumlah kedatangan wisman masih nihil di semester I.

Pada bulan Juli, jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara ada 28 Orang, Bulan Agustus 4 Orang dan September 3 Orang.

Periode Oktober dan November 2021, jumlah wisman yang berkunjung di Sumatera Utara mengalami penurunan 100,00 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020, yaitu dari 29 kunjungan tahun 2020 turun menjadi 0 kunjungan tahun 2021.

Tabel 3.18  
Jumlah Kunjungan Wisman Periode Januari s.d. Desember Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Kunjungan (orang)	Keterangan
1.	Januari	8	
2.	Pebruari	17	
3.	Maret	57	
4.	April	32	
5.	Mei	50	
6.	Juni	38	
7.	Juli	28	
8.	Agustus	4	
9.	September	3	
10.	Oktober	0	
11.	Nopember	0	
12.	Desember	NA	Belum release dari BPS
<b>Total Kunjungan</b>		<b>240</b>	

Catatan : Sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

#### 4. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Yang Lalu

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target tahun lalu dan beberapa tahun lalu adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja					
		Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>I.</b>	<b>Misi 1</b> : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
<b>I.I</b>	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama						
<b>1.</b>	Indeks kerukunan umat beragama	76,30	76,30	77,4	99,09	95,38	93,25



No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja					
		Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
<b>I.2</b>	Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan						
<b>1</b>	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,6	83,77	85	99,16	90,76	90,14
<b>I.3</b>	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan						
<b>1.</b>	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,08	115,21	119,06	98,98	106,54	118,94
<b>2.</b>	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,41	6,91	6,33	100	112,39	115
<b>3.</b>	Pertumbuhan PDRB	5,11	-1,07	2,61	96,42	98,49	47,45
<b>4.</b>	Persentase Kemiskinan	8,63	8,75	8,49	97,29	100,55	105,6
<b>5.</b>	Indeks Gini	0,317	0,316	0,313	102,52	97,84	99,37
<b>I.4</b>	Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah yang layak						
<b>1.</b>	Rasio rumah layak huni	93,18	95,77	69,5	100,46	102,46	74,16
<b>I.5</b>	Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima						
<b>1.</b>	Usia Harapan Hidup (UHH)	68,74	69,10	69,23	100	100,32	100,33
<b>2.</b>	Total Fertility Rate (TFR)	2,82	3,07	2,60	98,60	108,10	190
<b>I.6</b>	Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya konektifitas infrastruktur						
<b>1.</b>	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	82,19	82,27	76,37	99,04	97,34	88,50
<b>2.</b>	Rasio Elektrifikasi	99,11	99,82	99,82	99,21	99,82	99,82
<b>I.7.</b>	Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga						
<b>1.</b>	Inflasi	2,33	1,96	1,71	126,61	79,89	225
<b>I.8</b>	Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat						
<b>1</b>	Indeks Pembangunan Manusia	71,18	71,77	72	100,08	100,34	99,70
<b>II.</b>	<b>Misi 2</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis						
<b>II.1</b>	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik						
<b>1.</b>	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	WTP	WTP	-	100	100	-

No.	Indikator Kinerja Utama	Perbandingan Kinerja					
		Realisasi			Capaian (%)		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
2.	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	B	B	-	100	100	-
III.	<b>Misi 3</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri						
III.1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri						
1	Angka rata-rata lama sekolah	9,79	9,54	9,58	100	99,17	94,38
IV.	<b>Misi 4</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia						
IV.1	Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan						
1.	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	1,81	0,59	1,67	131	63,44	173,96
2.	Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan						
3.	Persentase masyarakat yang menerima wawasan kebangsaan	-	40	80	-	66,67	105
IV.2	Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan						
1.	Indeks pembangunan gender	90,93	90,71	90,67	100,07	99,76	99,64
V.	<b>Misi 5</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab						
V.1	Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan						
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,2	69,37	71,15	103,3	101	100,64
2.	Indeks Resiko Bencana	145,25	150	145,18	Tinggi	Tinggi	Tinggi
V.2	Sasaran Strategis 14 : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan						
1.	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	1.377.067	44.258	240	492	14,76	0,06

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 pengukuran dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama						
1	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	83	77,4	93,25%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketersediaan sandang dan pangan						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,3	85	90,14%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	100,10	119,06	118,94%	Sangat Baik
2	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,4	6,33	115%	Tinggi
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5	2,61	47,45%	Kurang
4	Persentase kemiskinan	Persen	8,04	8,49	105,6%	Tinggi
5	Indeks gini	Poin	0,32	0,313	99,37	Sangat Baik
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya rumah layak huni						
1	Rasio rumah layak huni	Persen	93,72	69,5	74,16%	Baik
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya kesehatan yang prima						
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69	69,23	100,33%	Sangat Baik
2	Total fertility rate (TFR)	Nilai	2,82	2,60	190%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya infrastruktur dasar						
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	86,29	76,37	88,50%	Sangat Baik
2	Rasio elektrifikasi	Persen	100	99,82	99,82%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya keterjangkauan harga						
1	Inflasi	Persen	2,85	1,71	225%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat						
1	Indeks pembangunan manusia	Poin	72,22	72	99,70%	Sangat Baik

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik						
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP			
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	B			
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri						
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,15	9,58	94,38%	Sangat Baik
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia						
Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan						
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,96	1,67	173,96%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan						
1	Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persentase	75	80	105,00%	Sangat Baik
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pergaulan						
1	Indeks pembangunan gender	Poin	91	90,67	99,64%	Sangat Baik
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab						

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
			Target	Realisasi		
Sasaran Strategis 1 : <b>Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan</b>						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70	71,5	100,64%	Sangat Baik
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	127	145,18	-	Tinggi
Sasaran Strategis 2 : <b>Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan</b>						
	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	370.000	240	0,06%	Kurang

## 5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
	<b>Misi 1</b> : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
	<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatkan kerukunan umat beragama				
1	Indeks kerukunan umat beragama	Poin	83	77,4	72,39
	<b>Sasaran Strategis 2</b> : Meningkatkan ketersediaan sandang dan pangan				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	94,3	85	91,6
	<b>Sasaran Strategis 3</b> : Meningkatkan mata pencaharian yang menyenangkan				
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	100,10	119,06	103,0
2	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	5,4	6,33	7,07
3	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,5	2,61	-3,49
4	Persentase kemiskinan	Persen	8,04	8,49	9,71
5	Indeks gini	Poin	0,315	0,313	0,381
	<b>Sasaran Strategis 4</b> : Meningkatkan rumah layak huni				
1	Rasio rumah layak huni	Persen	93,72	69,50	-
	<b>Sasaran Strategis 5</b> : Meningkatkan kesehatan yang prima				
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	69	69,23	71,47

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
2	<i>Total fertility rate</i> (TFR)	Nilai	2,82	2,60	2,45
<b>Sasaran Strategis 6</b> : Meningkatnya infrastruktur dasar					
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	86,29	76,37	-
2	Rasio elektrifikasi	Persen	100	99,82	-
<b>Sasaran Strategis 7</b> : Meningkatnya keterjangkauan harga					
1	Inflasi	Persen	2,85	1,71	3,69
<b>Sasaran Strategis 8</b> : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat					
1	Indeks pembangunan manusia	Poin	72,22	72	71,94
<b>Misi 2</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis					
<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik					
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP		-
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	B		-
<b>Misi 3</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri					
<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri					
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	10,15	9,58	8,48
<b>Misi 4</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia					
<b>Sasaran Strategis 1</b> : Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan					
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,96	1,67	-
<b>Sasaran Strategis 2</b> : Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan					
1	Persentase masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	Persentase	75	80	-
<b>Sasaran Strategis 3</b> : Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pergaulan					
1	Indeks pembangunan gender	Poin	91	90,67	91,27

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target Daerah	Realisasi	Nasional
	<b>Misi 5</b> : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
	<b>Sasaran Strategis 1</b> : Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	70	71,15	70,27
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	127	145,18	-
	<b>Sasaran Strategis 2</b> : Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan				
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	300.000	240	-

## 6. Capaian Indikator Kinerja Utama Sesuai Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P.RPJMD) Tahun 2019 – 2023

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan perubahan pada dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai perubahan adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target P.RPJMD	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1.	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	68,65 - 69,15	68,79	100,20
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	75,65 – 76,15	75,74	100,12
3.	Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	PDRB per Kapita ADHB	57	59	103,51
4.	Meningkatnya infrastruktur pendukung ekonomi	Indeks Infrastruktur	0,70	0,71	101,43
5.	Meningkatnya kualitas sistem politik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Indeks Demokrasi	65,25	Belum rilis	-
		Indeks Reformasi Birokrasi	(64,00)BB	Belum rilis	-

6.	Mewujudkan Sumatera Utara yang aman melalui penegakan hukum dan ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	91	96,51	106%
7.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas lingkungan hidup (IKLH)	69,02	71,15	103,09

## 7. Keberhasilan dan Permasalahan/Kegagalan Kinerja

### A. Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sasaran misi adalah sebagai berikut :

**Misi 1 :** Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh program :

1. Program kesejahteraan rakyat;
2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
3. Program kerawanan pangan;
4. Program keamanan pangan;
5. Program pengelolaan perikanan tangkap;
6. Program pengelolaan perikanan budidaya;
7. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
8. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
9. Program perencanaan tenaga kerja;
10. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
11. Program perencanaan tenaga kerja;
12. Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
13. Program penempatan tenaga kerja;
14. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;



15. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
16. Program sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman
17. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
18. Program pengembangan UMKM;
19. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro;
20. Program pengembangan iklim penanaman modal;
21. Program promosi penanaman modal;
22. Program pengelolaan ketenagalistrikan;
23. Program pengelolaan energi terbarukan;
24. Program standarisasi dan perlindungan konsumen;
25. Program penyelenggaraan jalan;
26. Program perkembangan permukiman;
27. Program pembinaan jalan dan jembatan;
28. Program peningkatan kualitas keluarga;
29. Program perekonomian dan pembangunan;
30. Program pengelolaan sumber daya air (SDA);
31. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU);
32. Program pengembangan perumahan;
33. Program kawasan permukiman;
34. Program pembinaan keluarga berencana (KB);
35. Program pengendalian penduduk;
36. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS);
37. Program perlindungan dan jaminan sosial;
38. Program pemberdayaan sosial;

**Misi 2 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan.

Selain itu, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya rasa berbangsa dan bernegara perlu diberikan pembekalan wawasan kebangsaan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan. Untuk mewujudkannya didukung oleh :

1. Program penataan organisasi;
2. Program penyelenggaraan pengawasan;
3. Program pengelolaan keuangan daerah;
4. Program pengelolaan pendapatan daerah.

**Misi 3 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.

Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Kesenjangan tingkat pendidikan penduduk dirasakan masih cukup besar, terutama tingkat pendidikan penduduk perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut disebabkan, antara lain, oleh ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan didukung :

1. Program pengelolaan pendidikan;
2. Program pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
4. Program pengembangan daya saing keolahragaan;
5. Program pembinaan perpustakaan.

**Misi 4 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia.

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan dan meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang didukung :

1. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
2. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
3. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
4. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan masyarakat;
5. Program peningkatan kualitas keluarga.

**Misi 5 :** Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha Esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu hubungan yang terjalin antara seluruh benda, daya, dan kondisinya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan hal yang ada di sekitarnya. Yang termasuk dalam suatu hubungan ini ialah manusia dan tingkah lakunya. Maka dari itu, jika lingkungan hidup rusak, kualitas lingkungan hidupnya pun akan turun, kalau kualitas lingkungan hidup menurun akan muncul berbagai masalah.

Untuk memajukan pariwisata Sumatera Utara, kemudahan akses infrastruktur, amenities, promosi dan pelaku bisnis perlu menjadi perhatian guna mengembangkan sektor pariwisata. Promosi khususnya untuk kawasan wisata Danau Toba yang dijadikan pemerintah sebagai kawasan strategis pariwisata.

Keberhasilan misi ini didukung oleh :

1. Program perencanaan lingkungan hidup;
2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
3. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
4. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
5. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup;
6. Program pengelolaan persampahan;
7. Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ);
8. Program pengembangan kebudayaan;
9. Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya;

10. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
11. Program pemasaran pariwisata;
12. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
13. Program penanggulangan bencana.

## **B. Permasalahan/Kegagalan**

Secara umum keseluruhan capaian kinerja tersebut telah tercapai dengan mendapat kategori "**sangat baik**" sekaligus memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk selalu meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa mendatang.

Untuk merealisasikan seluruh indikator kinerja dimaksud tetap didukung oleh program dan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dukungan dan komitmen Kepala Perangkat Daerah sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

Pada tahun 2021 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah berdasarkan prinsip money follow programme priority. Program yang dimaksudkan adalah program prioritas daerah, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran harus memperhatikan aspek-aspek berikut :

1. Holistik- Tematik Untuk mencapai sasaran prioritas nasional dirancang koordinasi berbagai Kementerian atau lembaga yang terkait. Sebagai contoh untuk mencapai kedaulatan pangan diperlukan koordinasi antara Kementerian Pertanian, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan, Perdagangan serta Pemerintah Daerah;
2. Integratif Kegiatan pembangunan direncanakan secara terintegrasi. Sebagai contoh, dalam hal pencapaian kedaulatan pangan tidak bisa hanya dengan peningkatan produktivitas lahan yang tersedia tetapi juga dengan upaya menghentikan konversi lahan produktif, reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan impor pangan (kombinasi berbagai program atau kegiatan).
3. Spasial kegiatan pembangunan yang direncanakan harus menunjukkan lokasi. Sebagai contoh, dalam hal pembangunan sawah baru, lokasi harus didukung dengan irigasi dan terintegrasi dengan jalan, gudang, pasar yang ada maupun yang direncanakan. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014,

belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, yang diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menyelaraskan prioritas dan sasaran kebijakan nasional, serta prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif. Arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan Pendidikan dan SDM, Kesehatan dan dalam rangka pemerataan pembangunan yang berkelanjutan;
2. Pengelolaan belanja daerah dapat memenuhi aturan earmarking untuk bidang kesehatan dan pendidikan, dimana anggaran pendidikan sekitar 20 persen dan kesehatan sekitar 10 persen;
3. Belanja daerah dikelola untuk penyelenggaraan program-program prioritas yang masuk di dalam urusan wajib dan urusan pilihan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku;
4. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian;
5. Belanja daerah yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
6. Belanja daerah harus mampu memenuhi program-program yang diarahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimal urusan pemerintahan dan operasional berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
7. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja sosial dan belanja hibah harus mengacu pada aturan yang berlaku. Selain itu, koordinasi dengan kabupaten/kota sampai dengan pemerintahan desa perlu ditingkatkan untuk menyelaraskan program dan

kegiatan sehingga hibah dan bantuan sosial dapat tepat sasaran, efektif, dan efisien;

8. Untuk akuntabilitas dan transparansi anggaran, maka kebijakan belanja hibah diarahkan kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat yang berbadan hukum. Hal ini untuk menjaga kepastian pertanggungjawaban belanja daerah dan dilakukan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Dalam upaya mendukung efisiensi dan efektivitas belanja daerah, maka perlu melaksanakan efisiensi belanja non fisik. Efisiensi belanja non fisik diarahkan pada efisiensi honorarium PNS, dimana penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020 Tentang APBD Provsu Tahun Anggaran 2021 dan Pergubsu Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya penetapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang P. APBD TA. 2021 dan Pergubsu Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penjabaran P.APD Tahun Anggaran 2021.

Secara garis besar pagu dan realisasi belanja daerah yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

<b>PAGU DAN REALISASI BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA PER OPD</b>				
<b>TAHUN ANGGARAN 2021</b>				
<b>NO.</b>	<b>OPD</b>	<b>PAGU</b>	<b>REALISASI</b>	<b>PERSEN</b>
1	Biro Perekonomian	2,684,886,550.00	2,615,969,188.00	97,43
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	423,980,174,791.00	383,107,068,301.00	90,36
3	Biro Hukum	3,884,518,250.00	3,296,633,565.00	84,87
4	Biro Umum	348,261,515,004.00	327,063,811,726.80	93,91
5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	5,647,268,337.00	5,165,949,908.00	91,48
6	Biro Organisasi	3,333,909,010.00	3,128,161,191.00	93,83
7	Biro Administrasi Pimpinan	15,123,190,859.00	14,300,207,976.00	94,56
8	Biro Pemerintahan dan Otonom Daerah	8,038,779,683.00	6,916,911,913.00	86,04

9	Biro Administrasi Pembangunan	3,265,837,124.00	3,079,199,052.50	94,29
10	Badan Kepegawaian Daerah	27,990,469,987.00	24,933,411,159.00	89,08
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38,110,532,164.00	34,838,693,190.00	91,41
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	70,172,249,151.00	65,729,282,178.00	93,67
13	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	19,097,049,000.00	18,254,042,126.00	95,59
14	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2,659,960,360,858.00	2,626,732,767,777.00	98,75
15	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	358,385,077,869.00	326,218,268,315.05	91,02
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	34,362,789,036.00	31,301,876,876.73	91,09
17	Badan Penghubung Daerah Provinsi	18,504,395,204.00	17,636,201,003.00	95,31
18	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	36,853,267,918.00	34,861,863,780.00	94,60
19	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi	645,212,803,227.00	587,316,753,616.00	91,03
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	37,738,092,200.00	35,563,739,478.36	94,24
21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	104,412,234,045.00	94,309,221,336.92	90,32
22	Dinas Kehutanan	113,758,473,750.00	102,022,683,022.00	89,68
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	69,996,457,568.00	65,452,822,651.61	93,51
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	16,406,644,000.00	14,814,407,558.00	90,30
25	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	102,120,410,585.00	94,684,979,848.01	92,72
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	54,543,846,291.00	42,969,112,813.00	78,78
27	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	49,081,419,814.00	45,679,297,457.00	93,07
28	Dinas Lingkungan Hidup	39,699,236,198.00	34,677,075,940.00	87,35
29	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	25,401,152,365.00	23,054,931,285.00	90,76
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14,800,371,000.00	12,718,801,094.00	85,94
31	Dinas Pemuda dan Olahraga	197,526,637,473.00	182,762,335,674.90	92,53
32	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	26,210,487,210.00	23,491,750,212.00	89,63
33	Dinas Pendidikan	6,020,744,771,968.00	5,835,247,378,909.32	96,92

34	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana	14,300,661,000.00	11,549,579,203.00	80,76
35	Dinas Perhubungan	64,023,974,751.00	56,792,663,329.53	88,71
36	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44,344,130,829.00	41,721,040,386.70	94,08
37	Dinas Perkebunan	39,463,007,278.00	36,906,045,699.00	93,52
38	Dinas Perpustakaan dan Arsip	23,649,537,090.00	21,647,894,340.00	91,54
39	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	58,818,268,513.00	56,076,301,279.61	95,34
40	Dinas Sosial	124,647,972,549.00	112,825,787,552.22	90,52
41	Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang	344,687,629,621.00	284,938,560,784.00	82,67
42	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	161,537,427,490.00	152,263,119,728.00	94,26
43	Dinas Tenaga Kerja	50,200,740,052.00	47,022,066,385.16	93,67
44	Dinas Kesehatan	635,120,292,996.00	585,030,801,517.00	92,11
45	Inspektorat Daerah	72,492,881,000.00	65,522,545,662.00	90,38
46	Rumah Sakit Jiwa Prof.DR. Muhammad Ildrem	70,196,682,650.00	64,692,742,992.00	92,16
47	Rumah Sakit Umum Haji Medan	178,813,177,949.00	161,984,096,433.90	90,59
48	Satuan Polisi Pamong Praja	54,235,890,473.00	47,760,366,176.00	88,06
49	Sekretariat DPRD	421,476,711,100.00	349,514,822,435.00	82,93
	<b>JUMLAH</b>	<b>13,953,318,293,830.00</b>	<b>13,220,194,044,025.30</b>	<b>94.75</b>

Sumber data : BPKAD Provsu (Unaudited)

Permasalahan dan solusi terkait penganggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara:

➤ Permasalahan

1. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 yang mulai diterapkan secara efektif mulai Tahun 2021 dimana hal ini sangat mempengaruhi jumlah belanja perjalanan dinas dan honorium;
2. Adanya kewajiban pemerintah melakukan penganggaran untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19 sehingga kurangnya dana transfer dari pusat sebesar 8% dari total Dana Transfer Umum;
3. Dilakukannya penganggaran belanja infrastruktur yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai ketentuan minimal sebesar 25 % dari jumlah dana Transfer Umum.



➤ Solusi

1. Berkenaan dengan hal tersebut maka seluruh perangkat daerah harus melakukan penyesuaian belanja perjalanan dinas dan honorium Tahun 2021 sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020;
2. Sehubungan dengan hal tersebut maka perangkat daerah harus mengurangi belanja yang pendanaannya berasal dari dana transfer;
3. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut maka perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengurangi biaya operasional kantor sebesar 25 %.

Pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 terkait Pembiayaan Daerah dapat diuraikan antara lain :

**TARGET DAN REALISASI PEMBIAYAAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

PEMBIAYAAN DAERAH		TARGET	REALISASI	PERSEN
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		<b>476,782,631,305.00</b>	<b>499,350,054,431.19</b>	<b>104.73</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	476,782,631,305.00	499,350,054,431.19	104.73
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		210,500,000,000.00	210,500,000,000.00	100.00
	Penyertaan Modal Daerah	210,500,000,000.00	210,500,000,000.00	100.00
PEMBIAYAAN NETTO		266,282,631,305.00	288,850,054,431.19	108.47
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)		0.00	1,103,028,191,839.06	0.00

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Laporan ini disusun berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2019—2023, dokumen perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2021.

Keberhasilan maupun kegagalan tersebut digambarkan dalam capaian Indikator Kinerja Utama serta analisis kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan sebagai sarana/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban

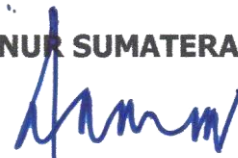
#### **B. Langkah Yang Akan Dilaksanakan Di Masa Mendatang**

Penguatan akuntabilitas instansi pemerintah salah satunya melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem AKIP ini dirancang untuk mengukur dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa mendatang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan sampai ke sampai ke aparatur sipil negara untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkualitas;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara di mulai dari peningkatan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 sampai ke dokumen pelaksanaan anggaran di masing-masing Perangkat Daerah;
3. Menyelaraskan sistem perencanaan, sistem penganggaran sampai ke sistem akuntabilitas kinerja secara berkesinambungan;
4. Memanfaatkan perencanaan kinerja secara optimal sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memperbaiki kinerja;
5. Melakukan monitoring atas realisasi target secara periodik atas kinerja Rencana Aksi secara berkala;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**



**EDY RAHMAYADI**